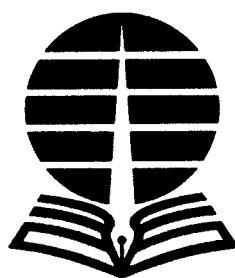


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI DESA SUNGAI PUKAT
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2007**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**MARBUANSYAH
NIM : 014 946 263**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang”.

MARBUANSYAH

Universitas Terbuka
Marbuansyahmap@yahoo.com

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, KUBE, Pemberdayaan, Kemiskinan

Penelitian ini merupakan refleksi dari keinginan penulis untuk meneliti lebih lebih mendalam mengenai sampai sejauh mana Implementasi dan pencapaian program bantuan sosial fakir miskin melalui pola KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Studi kasus ini dilaksanakan di Kecamatan Kelam Permai yang memiliki 6 KUBE dengan bidang usaha pengemukan sapi .

Hasil penelitian terungkap bahwa implementasi kebijakan Program Pemberdayaan keluarga miskin melalui Pola KUBE dalam tahap-tahap pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat mulai dari tahapan perencanaan usulan tidak melalui pendekatan dan penelitian sosial tentang kebutuhan masyarakat, dalam perencanaan usulan terkesan kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan aparat di tingkat Kecamatan. Sedangkan pada tahap pembinaan kegiatan pemantapan dan bimbingan kelompok dilakukan dalam waktu yang sangat singkat sehingga anggota kelompok tidak memahami tentang arti, maksud dan tujuan KUBE dibentuk serta pemahaman teknis tentang cara-cara pengemukan sapi. Peran petugas pendampingan kelompok tidak dapat berjalan, program bantuan tersebut terkesan yang bersifat *“hit and run”*.

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Sosial Pola Usaha Bersama (KUBE) tersebut diatas pada dasarnya sangat didukung dan mendapat harapan masyarakat anggota KUBE akan tetapi karena tidak adanya pembinaan dan pendamping kelompok timbul anggapan bahwa bantuan tersebut cuma-cuma tanpa ada suatu pertanggungjawaban dan kewajiban kelompok. Tujuan dan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui iuran kesetiakawanan sosial (IKS) sebagai embrio koperasi tidak dapat terbentuk. Sejak bergulirnya otonomi daerah jajaran Dinas Sosial tingkat Kecamatan yang dulu disebut Petugas Sosial Kecamatan keberadaannya tidak adalagi sehingga memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan usulan, pembinaan dan pengembangan kelompok. Ketidak sesuaian Implementasi kebijakan dan capaian program tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu latar belakang aparat pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan berlatang belakang pekerjaan sosial sehingga pemahaman akan tujuan program dan proses pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

A B S T R A K

Implementation of Policy Program Enableness of Impecunious Family Through Social Aid of Pattern the Group Effort Together in Countryside of River Catch Fish By Net Picturesque Dusky Subdistrict, Regency Sintang

MARBUANSYAH

Open University
Marbuansyahmap@yahoo.com

Keyword : Policy Implementation, KUBE, Enableness, Poorness.

The writer do this research to fulfil and reflect the writer's desire to search more detailed how far the implementation and achievement the program if social aid for impecunious family through pattern of group effort together executed by social on duty and labour and transmigration of Sintang regency. This case study of research is taken place at picturesque dusky subdistrict (Kelam Permai) which has 6 (six) the group effort together in the field of fattening cattle ox.

The result of research showed that the implementation of policy program enableness of impecunious family trough pattern of group effort together in the phase of the implementation has not done maximally yet. This matter can be seen from the planning of the proposal do not through the social research and approach about the requirement of society, in the plan of the proposal, there is lack of coordination and consultancy with the apparatus in the sibdistrict storey level. While in the phase of group guidance conducted in a very brief and short so that the number of the group do not understand about the meaning, porpuses and objectives of group effort together fomed and the technical understanding about the ways of fattening ox. The role of the guidance worker of the group cannot work well, so the program of the aid impress seemed "hid and run".

Strategy to overcome poverty through social aid of pattern is effort with the group effort together above basically is supported an get expectation by socialize member the group effort together, however for lack of the emporwerment group contruction arise ascription that the aids aids are without responsibility and compulsory for the group society. The objectives and principles of togetherness in the development and gain social fund through social fee solidarity as co-operation emberyo cannot be formed. Since the autonomy is rolled the social agencies at the subdistrict which is previously as a social workers the existence do not exist anymore so that influence to be proposal planning process, establishment and group construction. The unsuitability of the implementation policy and the achievement program also influenced by other factor that is background apparatus of on duty and transmigration labour social not caused by social work so that understanding for the achievement of program and the prosess of implementation do not run well.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Permai, Kabupaten Sintang tahun 2007.

Penyusun TAPM : MARBUANSYAH


NIM : 014 946 263

Program Studi : Administrasi Publik

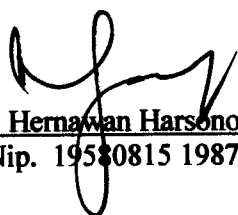
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. I. Nengah Baskara Wisnu Tedja, MEd
 Nip. 19581110 198601 1 001


Pembimbing I,

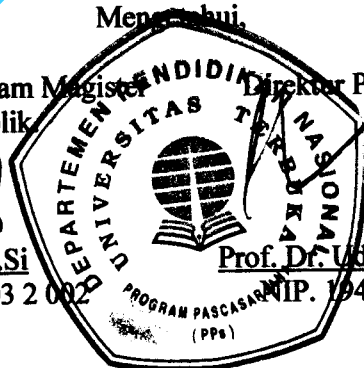

Dr. Hernawan Harsono, SE.MS.AK
 Nip. 19540815 1987030 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Administrasi Publik Direktur Program Pascasarjana


Dra. Susanti, M.Si
 Nip. 19671214 199303 2 002


Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
 NIP. 1945007 197302 1 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PACASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PULIK**

PENGESAHAN

Nama : MARBUANSYAH
 NIM : 014 946 263
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang Tahun 2007.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Senin / 14 Desember 2009

Waktu : 10.00 – 12.00

Dan telah dinyatakan : LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Ir. Eduard Zubir, MM

:

Penguji Ahli
 Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA.

:

Pembimbing I
 Dr. Hernawan Harsono, SE.MS.AK.

:

Pembimbing II
 Dr. I. Nengah Baskara Wisnu Tedja, MEd

:

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

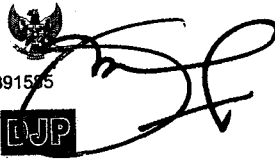
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,2009

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENAWANGUN BANGSA
TGL
C811FAAF021391515
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **LJP**


(Ni ARBUANSYAH)
NIM : 014 946 263

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang dilakukan penulis yang berjudul: *“Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang,”* akhirnya dapat diselesaikan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Hernawan Harsono, SE. MS. AK, selaku Pembimbing Pertama dan Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, M. Ec. selaku Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bantuan bimbingan, pengetahuan dan arahan, kepada penulis sehingga terselesainya tugas akhir program Magister (TAPM) ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta staf yang telah membantu penulis mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
2. Hendrika, S.Sos. M.Si. Selaku Camat Kelam Permai, yang telah turut serta memberikan bantuan data dan informasi yang diperlukan penulis.

3. Bapak Sulaiman mantan Kepala Desa SungaiPukat yang telah memberikan bantuan sehingga mempermudah penulis mendapat data atau informasi yang berharga.
4. Ketua dan anggota KUBE yang ada di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai yang telah membantu penulis mendapatkan informasi serta informan lainnya sehingga penulis memiliki gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti.
5. Kepada pendamping KUBE yang telah bersedia membantu penulis dalam mendapatkan data serta informasi yang sangat diperlukan demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program Magister Publik Universitas Terbuka khususnya program studi Administrasi Publik kelas Sintang, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spirituil kepada penulis sehingga terselesainya penyusunan TAPM ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang setimpal. Amin....!

Penulis juga menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menghargai setiap kritikan dan saran-saran yang diberikan oleh pembaca demi lebih kesempurnaan hasil penelitian ini.

Pontianak,

2009

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
	ABSTRAK -----	i
	LEMBAR PERSETUJUAN -----	ii
	LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
	LEMBAR PERNYATAAN -----	iv
	KATA PENGANTAR -----	v
	DAFTAR ISI -----	vii
	DAFTAR TABEL -----	viii
	DAFTAR LAMPIRAN -----	ix
BAB I	PENDAHULUAN -----	1
	A. Latar Belakang Masalah -----	1
	B. Perumusan Masalah -----	10
	C. Maksud dan Tujuan Penelitian -----	11
	D. Kegunaan Penelitian -----	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA -----	13
	A. Kajian Teoritik -----	13
	B. Kerangka Berpikir -----	50
	C. Definisi Operasional -----	52
BAB III	METODE PENELITIAN -----	55
	A. Jenis Penelitian -----	55
	B. Populasi Sampel -----	56
	C. Instrumen Penelitian -----	58
	D. Prosedur Pengumpulan Data -----	59
	E. Metode Analisis Data -----	61
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN -----	64
	A. TEMUAN -----	64
	B. PEMBAHASAN -----	88
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN -----	94
	A. Kesimpulan -----	94
	B. Saran -----	97
	DAFTAR PUSTAKA -----	100
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1.	DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI KELUARGA MISKIN DARI TAHUN 1998/2008 -----	4
1.2.	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, JENIS USAHA BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI KELUARGA MISKIN DARI TAHUN 1998 S/D 2008 -----	6
1.3.	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, DISTRIBUSI PENDUDUK, PENDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2008 -----	7
1.4.	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KUBE DI DESA SUNGAIPUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI -----	8
2.1.	ALUR BERFIKIR PENELITIAN -----	51
4.1.	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PENGEMUKAN SAPI -----	85
4.2.	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG, LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN ARISAN KELOMPOK -----	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) paling tidak mencakup 3 (tiga) agenda pokok yaitu: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pemahaman terhadap tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menegaskan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam individu, keluarga dan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan dan ketentraman lahir batin serta memiliki harga diri menurut objek masing-masing.

Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah akan tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibina dan dikembangkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-intitusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mencakup :

- a. Peningkatan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial (*social service*) dan jaminan sosial (*social security*) terutama kepada masyarakat yang rentan atau kurang beruntung (*disadvantaged*) yang memerlukan perlindungan sosial (*social protection*).
- b. Meningkatkan keberdayaan sosial (*social empowerment*) melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi.
- c. Perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Pembangunan Sosial menurut Midgley (dalam Isbandi, Rukminto Adi, 2002:118) adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Isu krusial yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dibidang kesejahteraan adalah masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Krisis ekonomi, sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1997 yang lalu berakibat terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh SMERU (2004:3) diketahui bahwa “sebelum krisis ekonomi terdapat 20 juta penduduk yang masuk kategori miskin, sesudah krisis ekonomi jumlah tersebut menjadi 40 juta orang miskin”.

Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan tersebut adalah lemahnya potensi masyarakat dan rendahnya dukungan lingkungan sosial dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber yang tersedia. Di samping itu juga kondisi yang diciptakan sementara pihak berupa ketidakadilan,

ketidak kepedulian dan sikap apatis terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sekitar. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan diperlukan upaya represif disamping upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat. Disadari bahwa dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan memecahkan masalah apa bila arahnya diberikan dalam bentuk bantuan sementara apalagi yang bersifat "*hit and run*". Oleh karena itu, perlu suatu program berkesinambungan di berbagai aspek pembangunan baik pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan keamanan.

Berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan seperti program Pemberdayaan Masyarakat Dampak Krisis Ekonomi (FMDKE), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan sebagainya telah dilaksanakan. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut secara umum hasilnya masih dirasakan belum optimal. Banyak faktor penyebab hal tersebut, diantaranya adalah kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya diarahkan untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber yang tersedia dalam masyarakat. Hal ini makin diperburuk dengan anggapan dari sebagian besar masyarakat miskin (penerima program) bahwa bantuan yang diberikan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak mempunyai resiko dan untuk dikebalikan/digulirkan.

Mencermati hal tersebut, salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia di berbagai daerah adalah bantuan sosial pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang bersifat *society* dengan harapan pencapaian hasil akan cepat, langgeng dan berkelanjutan. Pendekatan

ini diperkenalkan bukan semata-mata usaha ekonomis produktif tetapi didalamnya terkandung tumbuhnya koperasi kebersamaan sosial. Ciri utama program KUBE adalah hasil usaha dapat digulirkan kepada anggota dan sebagian untuk pengembangan kelompok, dari KUBE akan tumbuh rasa saling percaya, membantu, menopang, menghargai dan mentaati kesepakatan dengan demikian akan meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial didalam masyarakat.

Tabel 1.1. DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI KELUARGA MISKIN DARI TAHUN 1998 s/d 2008

No	Kecamatan	Penduduk	Penduduk Miskin	KK	JMLH KUBE
1	Serawai	21.215	11.441	3.408	-
2	Ambalau	14.085	5.179	1.913	-
3	Kayan Hulu	21.696	7.328	2.257	15
4	Kayan Hilir	23.010	6.181	2.327	-
5	Sepauk	41.563	9.336	2.869	-
6	Tempunak	24.016	8.358	2.738	10
7	Sungai Tebelian	26.037	5.036	1.714	-
8	Sintang	51.398	6.863	1.738	10
9	Dedai	24.779	9.107	2.864	10
10	Kelam Permai	14.086	7.002	3.424	15
11	Binjai Hulu	10.650	3.979	1.324	10
12	Ketungau Hilir	19.083	6.965	2.270	20
13	Ketungau Tengah	25.572	12.741	3.434	20
14	Ketungau Hulu	18.228	9.387	2.528	-
Kabupaten		335.418	108.903	33.603	110

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Desember 2008.

Pemerintah Kabupaten Sintang sudah melaksanakan program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejak tahun 2000 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel diatas ini:

Penanggulangan masalah kemiskinan melalui bantuan UEP KUBE fakir miskin di Kabupaten Sintang masih menghadapi masalah, sebagaimana dikemukakan

oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Alokasi dana pengentasan kemiskinan baik bersumber dari APBD maupun APBN terbilang sangat tidak sesuai jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi (32,47%). (Bappeda Kabupaten Sintang, Tahun 2008)
2. Sumber dana penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sementara ini lebih mengandalkan dari dana dekonsentrasi melalui Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat.
3. Keterbatasan anggaran yang dialokasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengakibatkan ketidak mampuan daerah menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program yang bersumber dari dana dekonsentrasi.
4. Sejak bergulirnya otonomi daerah dengan terputusnya hubungan secara hirarki antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat, disamping itu juga ketiadaan jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada di Kecamatan dulunya disebut Petugas Sosial Kecamatan sehingga pola perencanaan, pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan pengentasan keluarga miskin di lapangan menjadi tidak berjalan sebagai sebagaimana yang diharapkan.
5. Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Program Bantuan Sosial Pola KUBE melalui dana dekonsentrasi tidak sesuai lagi dengan kebijakan otonomi daerah, dimana pelaksanaan program masih ditentukan oleh Departemen Sosial RI (Pusat) dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, mengenai jenis usaha bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin di Kabupaten Sintang dari tahun 1998 s/d 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG JENIS USAHA BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA BAGI KELUARGA MISKIN DARI TAHUN 1998 s/d 2008

No	Kecamatan	Pengemukan Sapi/Kambing/Babi	Keramba/kolam Ikan	Home Industri	JMLH KUBE
1	Serawai	-	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-
3	Kayen Hulu	10	-	5	15
4	Kayan Hilir	-	-	-	-
5	Sepauk	-	-	-	-
6	Tempunak	5	5	-	10
7	Sungai Tebelian	-	-	-	-
8	Sintang	10	-	-	10
9	Dedai	10	-	-	10
10	Kelam Permai	10	-	5	15
11	Binjai Hulu	-	10	-	10
12	Ketungau Hilir	10	10	-	20
13	Ketungau Tengah	15	5	-	20
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-
Kabupaten		70	30	10	110

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Desember 2008.

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Kelam Permai merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sintang yang menerima bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin. Luas wilayah kecamatan ini adalah 523,80 km² terdiri dari 16 Desa dan 58 Dusun. Adapun Desa-desanya yang terdapat di Kecamatan Kelam Permai adalah: Desa Kebong, Merpak, Baning Panjang, Bengkuang, Ensaid Panjang, Nanga

Lebang, Pelimping, Sei. Maram, Sei. Pukat, Sepan Lebang, Gembala Raya, Karya Jaya Bhakti, Mandiri Jaya, Landau Kodam, Sungai Labi dan Desa Sungai Lais.

Sedangkan ditinjau dari distribusi penduduk dan keluarga miskin di Kecamatan Kelam Permai Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DISTRIBUSI PENDUDUK, PENDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2008

No	Desa	Jmlh Jiwa	Jmlh KK	Jmlh KK Miskin	%
1	Kebong	1.882	484	102	21,07
2	Merpak	1.508	383	148	38,44
3	Nanga Lebang	1.184	311	73	23,47
4	Sungai Maram	1.401	378	208	55,02
5	Ensaid Panjang	596	153	88	57,51
6	Baning Panjang	1.474	451	103	22,83
7	Pelimping	1.029	271	87	32,10
8	Sepan Lebang	633	169	53	31,36
9	Sungai Pukat	653	179	170	94,97
10	Bengkuang	941	266	173	65,03
11	Gembala Raya	940	234	153	65,38
12	Karya Jaya bhakti	940	255	75	29,41
13	Mandiri Jaya	909	278	101	36,33
14	Landau Kodam	505	120	54	45
15	Sungai Labi	537	135	105	77,77
16	Sungai Lais	550	150	66	44
	Jumlah / Rata-Rata	15.682	4.219	1.759	41,69

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Desember 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, salah satu Desa yang cukup banyak Keluarga miskin adalah Desa Sungai Pukat. Oleh karena itu, Desa Sungai Pukat merupakan lokasi yang menerima bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin.

Jumlah kelompok usaha bersama Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel 1.4. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL MELALUI POLA KUBE DI DESA SUNGAI PUKAT KECAMATAN KELAM PERMAI

No	Nama KUBE	Ketua KUBE	Jumlah Ternak	Jumlah Anggota	Jenis		Keterangan
					U	P	
1.	Sejahtera Satu	Linen	4	10	3	1	± 5 s/d 8 bln
2.	Sejahtera Dua	Wowok	4	10	2	2	± 5 s/d 8 bln
3.	Sejahtera Tiga	Sukar	4	10	2	2	± 5 s/d 8 bln
4.	Lebi	Suratmin	4	10	1	3	± 5 s/d 8 bln
5.	Terai Indah Satu	Liman	4	10	2	2	± 5 s/d 8 bln
6.	Teratai Indah Dua	Sulaiman	4	10	2	2	± 5 s/d 8 bln
	Tahun 2007		24	60	12	12	-

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Desember 2008.

Berdasarkan data pada tabel di atas, jenis usaha bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kalam Permai adalah usaha pengemukan sapi. bantuan kelompok usaha bersama bagi keluarga miskin di Kabupaten Sintang masih belum didukung anggaran yang memadai. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain: (1) Pembangunan kesejahteraan sosial sering kali terjegal oleh *mainstream* yaitu pemikiran ekonomi yang kapitalistik dimana kesejahteraan akan tercipta dengan sendirinya bila pertumbuhan ekonomi dipacu

setinggi mungkin, (2) Pembangunan kesejahteraan sosial hanya sebagai investasi jangka pendek dan tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta (3) Penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan merupakan kelompok lemah yang tidak mempunyai kekuatan dalam *bargaining position* dalam membela kepentingan dan kebutuhannya.

Akibat dari permasalahan tersebut di atas menimbulkan : (1) Program bantuan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin tidak dapat dilakukan secara optimal dan merata diberbagai daerah dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan, (2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana tertuang dalam pedoman teknis Dirjen Bantuan Kesejahteraan sosial dalam Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama, dan (3) Menyamakan jenis bantuan dan strategi penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah Kalimantan Barat.

Mekanisme bantuan dana dekonsentrasi untuk penanggulangan kemiskinan dimulai sejak tahun 2003 dan untuk seterusnya diperkuat dengan dukungan dana melalui fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan ketentuan bantuan dana dekonsentrasi diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota penerima program sesuai usulan yang disampaikan. Usulan tersebut sebelumnya melalui proses perencanaan dan usulan ditingkat bawah yaitu oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui Petugas Sosial Kecamatan/Kasi Kemasyarakatan Kantor Kecamatan setempat/Pekerja Sosial Masyarakat. Proses tersebut meliputi tahapan pendataan keluarga miskin, pendataan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya diperkuat dengan rekomendasi dari Camat dan selanjutnya

diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi sebagai usulan program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Pola Bantuan KUBE.

Tahapan-tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan keluarga miskin melalui program Bantuan Sosial Pola KUBE mulai dari penjarangan lokasi dan pelaksanaan dulunya terlaksana dengan baik. Akan tetapi sejak bergulirnya otonomi Daerah muncul berbagai permasalahan. *Pertama*, tentang hubungan hirarki antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Kedua*, perubahan institusi sosial yang di daerah berbeda-beda (adanya keinginan Depsos Pusat agar Institusi sosial yang berdiri sendiri bukan bergabung dengan intitusi/bidang lainnya). *Ketiga*, ketiadaan jajaran Dinas Sosial sampai di tingkat Kecamatan serta banyaknya pegawai Dinas sosial bukan dari unsur Pekerja Sosial, sehingga menimbulkan kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya pada: Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Pola KUBE khususnya yang berada di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 2007.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "*Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama). di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 2007 ?*".

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian ilmiah aspek kebijakan publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan melalui pedoman Pengembangan Usaha Keluarga Binaan Sosial dalam KUBE yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial RI.
2. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai tahun 2007
 - b. Untuk mengetahui pencapaian program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian ilmiah dan wawasan teoritis pada pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada aspek implementasi kebijakan dan manajemen pelayanan sosial.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran kepada jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam meningkatkan pelayanan bagi keluarga miskin dalam bentuk Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dimasa akan datang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan secara harfiah berkaitan dengan sikap dari pemerintah atau pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, Dye (dalam Winarno, 2002:15) memberikan definisi kebijakan sebagai suatu tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup untuk memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi, suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

Apabila dikaji secara mendalam, kebijakan publik orientasi tunggalnya adalah pada kepentingan publik seyogyanya menurut Islamy (dalam Putra, 2005:34) memiliki semangat kepublikan, yang mau tidak mau implikasinya harus menempatkan publik sebagai aktor utama dalam tiap-tiap proses kebijakan publik. Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan sendiri.

David Easton (dalam Islamy, 2000:25) menyatakan bahwa “kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa hanya pemerintah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai= kebijakan) kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemerintah merupakan penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah kehidupan rakyat sehari-hari yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan.

Ini bermakna bahwa meskipun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dapat dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimana pun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Krismartini,dkk. 2008 :1.6) Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh

Pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat Pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan Pemerintah.

Sedangkan menurut Anderson (dalam Islamy, 2000:30) merumuskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah). Selanjutnya, implikasi dari kebijakan publik itu menurut Anderson adalah (1) Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; (2) Kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Kebijakan publik itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif-dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5) kebijakan pemerintah, setidaknya tidaknya dalam arti yang positif – didasarkan atau selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Sifat kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Agustino (2006:9) dan Winarno (2002:19-20) merupakan bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik bila dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. tuntutan tersebut berupa desakan

agar pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

2. Keputusan kebijakan (*policy decision*) adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statement*) adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan seperti ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, keputusan pengadilan dan lain sebagainya.
4. Hasil kebijakan (*policy output*) adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik, atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Ini bermakna apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
5. Akibat dari kebijakan (*policy outcomes*) adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan yang berasal dari apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Sementara itu Amir Santoso (dalam Winarno, 2002) mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam Dua wilayah kategori. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan *kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi atas dua kubu, yakni kubu pertama, mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan kubu kedua, mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga

lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dari akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ini bermakna bahwa kebijakan publik mempunyai implikasi sebagai berikut: (1) bahwa kebijakan publik dalam bentuk utamanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; (2) bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; (3) bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan; (4) bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk hubungan yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik, sehingga dapat terwujud hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam

prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2000:65) menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan negara adalah "... lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya melalui beberapa tahapan tertentu, melalui tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun tidak dari output tersebut, dampak keputusan yang dipersiapkan oleh badan-badan pengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting."

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Memperhatikan pandangan tersebut, nampak jelas bahwa proses implementasi kebijakan mengandung unsur, yaitu (a) masalah yang ingin dipecahkan; (b) mempertegas tujuan yang ingin dicapai; (c) cara menstruktur atau mengatur; (d) mengesahkan undang-undang dengan disertai output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) yang melaksanakannya; (e) kesediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan tujuan itu; (f) dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari output kebijakan; (g) upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini searah dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stewart Jr (2000:104) bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Robert Linebery (dalam Wahab, 2000:89) menyatakan proses implementasi memiliki elemen-elemen penting, yaitu:

1. Kreasi dan staffing agen baru guna mengimplementasikan kebijakan baru atau menetapkan tanggung jawab implementasi kepada personel atau agen yang ada.
2. Menterjemahkan maksud dan tujuan legislatif ke dalam aturan-aturan operasional yang baik: perlu pengembangan panduan bagi para implementor.
3. Koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan pada target group: pengembangan tanggung jawab divisi-divisi dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait.
4. Alokasi sumber daya guna kemampuan dampak kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses kebijakan dapat dimulai apabila tujuan atau sasaran dari kebijakan ditetapkan, program pelaksanaan dibuat, dana teralokasikan dan agen-agen pelaksana telah disepakati dan direkomendasikan untuk mencapai tujuan. Berknaan dengan itu, Anderson (Islamy:2000:76) mengungkapkan 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: (1) Siapa yang dilibatkan dalam

implementasi; (2) Hakikat proses administrasi; (3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan (4) Efek atau dampak dari isi implementasi.

Ke empat aspek sebagaimana disebutkan di atas merupakan serangkaian tata pelaksanaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan publik, sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat di implementasikan berdasarkan pada penentuan unit pelaksana. Sebagaimana menurut Anderson disebut *administrative unit* yaitu jajaran birokrasi publik dimulai dari level atas sampai pada level bawah. Untuk keperluan ini, Islamy (2000:87) menetapkan implementasi kebijakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Self executing*, artinya bahwa dengan dirumuskan dan disahkan suatu kebijakan, maka kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya.
2. *Non self executing*, artinya bahwa suatu kebijakan diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Akan tetapi, dalam kenyataannya setiap implementasi kebijakan tidaklah berjalan mulus dan bisa mengalami resiko kegagalan, karena dalam proses implementasi kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan dengan apa yang senyatanya ingin dicapai. Sebagaimana dikemukakan Andrew Dunsire (dalam Wahab, 2000:86) disebut *implementation gap*.

Sehubungan dengan itu, Parker (dalam Wahab, 2000:137) lebih jauh menyatakan implementasi kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Ketentuan ini menyangkut adanya dimensi-dimensi dalam implementasinya. Hal terpenting kedua

adalah tindakan-tindakan yang diambil memenuhi keabsahan karena telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebelum implementasi itu dilaksanakan.

Kebijakan yang tidak dapat terimplementasikan sebagaimana dikemukakan Hogwood dan Gun (dalam Wahab, 2000:89) disebabkan yaitu: (1) kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai rencana; (2) mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tidak mau bekerjasama; (3) bekerjanya tidak efisien; (4) hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil karena (a) kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan dan (b) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (dalam Agustino, 2006: 136) bahwa “implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan”.

Lebih lanjut diungkapkan Ashari (2003:45), beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif yaitu: “(1) Organisasi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik (memenuhi *performance*) serta (2) Isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat. Persyaratan ini berhubungan dengan utilitas fasilitasi pelayanan publik”. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down*

dan *bottom up*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Implementasi kebijakan dalam pendekatan *top-down* dimana implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top-down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya.

Jadi inti pendekatan *top-down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sedangkan *bottom-up* merupakan kebijakan yang berasal dari bawah (masyarakat) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Menurut Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2006:141-142) terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Matter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:142) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Agustino (2006:157) beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik, yaitu:

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya sanksi hukum
4. Adanya kepentingan publik.
5. Adanya kepentingan pribadi
6. Masalah waktu.

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan.

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada.
2. Tidak adanya kepastian hukum.
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

Program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola kelompok usaha bersama merupakan salah satu kebijakan sosial Pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Sedangkan menurut Spicker (dalam Suharto, 2005:16) Kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*) menyangkut kualitas hidup manusia dan pemberian pelayanan kolektif guna melindungi kesejahteraan rakyatnya. Tujuan kebijakan sosial memuat inti pokok yaitu:

1. Pemecahan masalah sosial yang mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) yang bersifat destruktif atau fatologis yang merusak tatanan kehidupan masyarakat.

2. Pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan sosial yang diperlukan baik preventif maupun rehabilitatif dalam penanganan masalah, ataupun usaha-usaha pengembangan, peningkatan kualitas hidup agar menjadi lebih baik.

Sejalan dengan kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin melalui pola bantuan usaha kelompok maka dari aspek tujuan kebijakan sosial menurut David Gil (dalam Winarno, 2002:109) memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah sosial (kemiskinan) yang terjadi dalam masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok yang tidak dapat terpenuhi melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan sosial menurut Conyers (dalam Suharto, 2004: 69) adalah model proses pelaksanaan kebijakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaksanaannya, yaitu: (a) Model kebijakan sosial Imperatif adalah kebijakan sosial terpusat yakni seluruh tujuan sosial, jenis, sumber dan jumlah pelayanan ditentukan pemerintah, (b) Model kebijakan sosial indikatif yakni seluruh kebijakan mengupayakan pada kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat sedangkan Pemerintah hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besarnya sedangkan masyarakat melaksanakan sepenuhnya.
2. Berdasarkan ruang lingkup, yaitu: (a) Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara menyeluruh, dengan demikian semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima pelayanan, (b) Model selektifitas yaitu kebijakan yang diarahkan kepada mereka yang

- membutuhkan melalui retribusi anggaran secara selektif seperti bantuan modal lunak, bantuan makanan, pelayanan kesehatan gratis (*medicaid*) dan sebagainya hanya diberikan kepada yang membutuhkan (keluarga miskin).
3. Berdasarkan keberlanjutan, yaitu: (a) Model residu yaitu model kebijakan sosial hanya diperlukan apabila dikarenakan suatu sebab (kehilangan mata pencarian/ meninggal dunia), pelayanan sosial bersifat temporer dan segera dihentikan manakala keberfungsian sosial telah normal, (b) Model institusional yaitu model kebijakan sosial yang tidak mempertimbangkan berfungsi tidaknya lembaga alamiah, pelayanan bersifat melembaga dan berkesinambungan, model ini disebut juga model antisipatif.
 4. Karakteristik badan pelaksana. Karakteristik badan pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi itu sendiri. dalam struktur birokrasi tersebut beberapa hal yang mungkin berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, tingkat komunikasi, sumber-sumber politik, vitalitas, serta kaitan formal dan informal dengan badan pelaksana keputusan maupun pembuat keputusan.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan sosial pengentasan kemiskinan menurut Hardiman dan Midley (dalam Edi suharto, 2005:41) adalah menekankan pada pemberdayaan kelompok marginal, yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi melalui: (1) Menumbuh kembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja, dan (2) Memberikan pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari rumusan pasal 33 UUD 1945 yang berkenaan peningkatan kesejahteraan sosial. Berbagai kebijakan pemerintah di bidang sosial adalah sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar tersebut. Dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan

pembangunan. Kebijakan sosial haruslah senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling berkait, yaitu untuk memecahkan masalah sosial dan untuk memenuhi kebutuhan sosial.

Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan, pengangguran dan lain-lain) atau kejadian yang bersifat destruktif patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain). Sedangkan tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, atau mencegah meluasnya masalah) atau bersifat pengembangan (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya).

Searah dengan pendapat Suharto (2005:62) merumuskan tujuan-tujuan kebijakan sosial yaitu mengurangi masalah sosial di masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan hubungan antar manusia, meningkatkan situasi kondusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menggali potensi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar implementasi Program Bantuan Usaha Bersama (KUBE) dapat efektif yaitu organisasi pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik, isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, masyarakat

mempunyai kepercayaan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan harus selalu dan siap beradaptasi dengan perubahan lingkungan (nilai-nilai baru dalam pelayanan publik).

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada era demokrasi dan reformasi sekarang ini dengan semangat *civil society*, konsep mengenai pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) semakin mendapat tempat dalam relung kesadaran publik. Pembangunan kesejahteraan sosial yang semula didominasi negara, kini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi-organisasi sosial. Pendekatan pembangunan selama ini yang berporos pada pertumbuhan ekonomi yang berwajah sentralistis dan bersifat top-down telah dianggap kurang berhasil, sehingga menumbuhkan kesadaran dan tekad para aktor pembangunan di Indonesia untuk memasukkan dimensi pemberdayaan ke dalam strategi pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat atau ada yang menyebutnya *community development* merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju ke arah yang positif. Menurut Giarci (2001), memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Subejo dan Supriyanto (2004:14) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk

memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *colletive action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya (Subejo dan Supriyanto, 2004:15).

Menurut Prijono dan Pranaka (1996:59) "Pemberdayaan (*Empowerment*) merupakan bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang berwujud dalam berbagai kehidupan misalnya politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain". Oleh karena itu konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan semakin efektif

secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Pemikiran lain menurut Paul (dalam Priyono dan Pranaka, 1996:63) mengungkapkan bahwa “pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*Equal Power Sharing*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan”, sedangkan menurut Bookman dan Morgan (dalam Priyono dan Pranaka, 1996:177) menegaskan bahwa “Pemberdayaan sebagai konsep yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya, melakukan mobilitas ke atas serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.

Secara lebih khusus Priyono dan Pranarka (1996:56-57) mengungkapkan bahwa “proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu: *Pertama*: kecenderungan primer yang merupakan proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat. *Kedua*: kecenderungan sekunder menekankan kepada proses menstimulasikan, mendorong atau memotivasi

Sedangkan menurut Stewart (2000: 112-128) secara lebih rinci menguraikan bahwa ada delapan butir pemberdayaan yaitu:

- a. Mengembangkan visi bersama
- b. Mendidik
- c. Menyingkirkan rintangan
- d. Mengungkapkan
- e. Menyemangati
- f. Memperlengkapi
- g. Menilai dan Mengharapkan

Kedelapan butir pemberdayaan di atas sebagaimana dikemukakan oleh Stewart (2000:112-128) dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut; Dalam rangka pemberdayaan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi adalah mengembangkan visi bersama sehingga tujuan dan sasaran spesifik baik bagi individu maupun kelompok serta batas kekuasaan masing-masing unit dapat disepakati dan dipahami secara jelas. Jika setiap pegawai mengetahui apa yang mereka capai, maka mereka mungkin akan memadukan usaha memanfaatkan sumber-sumber daya secara lebih efektif dan lebih bersahabat sehingga perselisihan dalam organisasi dapat dihindarkan.

Menurut pendapat penulis bahwa konsep tersebut saat ini telah diterapkan di negara kita, meskipun dalam kenyataannya masih belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam beberapa tahun model pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya di bidang sosial telah sejalan dengan lima konsep di atas. Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan yang tadinya tidak dilibatkan dan bahkan diasingkan dari proses pembangunan, kini dipandang sebagai subyek, bahkan menjadi aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidupnya. Masyarakat tidak lagi dianggap hanya sebagai penerima pasif dari berbagai ragam kegiatan pembangunan. Mereka diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam mengorganisir dan mengambil keputusan, merespon berbagai permasalahan, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep pendekatan pembangunan yang bermatra pemberdayaan, seperti partisipatoris, emansipatoris, inisiatif lokal, kearifan lokal, pembangunan

berbasis masyarakat, berpusat pada rakyat, kini semakin dipandang sebagai keniscayaan dalam strategi pembangunan.

Pembangunan belum dapat dianggap berhasil apabila hanya mengejar peningkatan bidang fisik materiil semata tanpa peningkatan di bidang mental spiritual. Pembangunan juga akan kurang bermakna bila tidak memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat yang notabene mereka adalah subyek pembangunan dan mereka juga yang akan merasakan manfaat pembangunan tersebut. Membahas mengenai Pembangunan Nasional, pertama-tama yang mendapat kejelasan konsep (*contract*) pembangunan itu sendiri. Saul M Katz (dalam Yuwono, 2001:53) membuat definisi pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan nasional tertentu ke keadaan nasional lain yang dianggap bernilai.

Dewasa ini model pembangunan lebih ditekankan pada masyarakat (*people centered model*). Paradigma ini menurut Guy Gran dan David Korten (dalam Yuwono, 2001:50-52) memberi peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Salah satu prasyarat untuk mencapai tujuannya dari paradigma ini adalah desentralisasi yang cukup besar dalam pembuatan keputusan. Lebih dari sekedar delegasi wewenang formal yang sederhana yang dimaksud disini adalah gaya dasar dan metodologi dalam pembuatan keputusan harus mengalami perubahan. Hal ini menurut hemat penulis sejalan dengan jiwa dan semangat otonomi yang luas dan nyata, yang kini sedang gencar-gencarnya diserukan oleh berbagai elemen.

Model pembangunan yang berpusat pada masyarakat menurut Korten (Yuwono, 2001: 52) memiliki tiga dasar yang harus diwujudkan untuk mengarahkan paradigma ini, yaitu:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka pada tingkatan individual, keluarga dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial berlandaskan pada kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal.

Lebih lanjut *United Nation Center for Regional Development* (UNCRD) sebagai salah satu badan dalam PBB mengemukakan adanya tiga (3) pengertian mengenai pembangunan masyarakat, yaitu:

1. Pembangunan masyarakat sebagai pengadaan pelayanan masyarakat, interpretasi pembangunan masyarakat yang demikian ini merupakan kelengkapan dan strategi kebutuhan pokok. Pembangunan dalam hal ini identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial seperti kesehatan, gizi, pendidikan, sanitasi dan sebagainya dalam keseluruhannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembangunan masyarakat secara upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi.
3. Pembangunan sosial sebagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat.

Menjadi lebih jelas bahwa konsep pembangunan nasional yang bersifat *sustainable development* haruslah mengintegrasikan pembangunan masyarakat sebagaimana diinterpretasikan di atas. Melalui program pembangunan yang demikian akan tumbuh kemampuan masyarakat untuk membangun dengan kemampuan sendiri.

Jika dilihat dari prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan

keanekaragaman daerah, maka dapat disimpulkan bahwa jiwa dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah *perubahan titik pandang dari sentralistik menjadi lebih melihat kepada kepentingan masyarakat di daerah masing-masing*. Otonomi daerah yang sesungguhnya pada intinya adalah wewenang berada pada rakyat yang tinggal di daerah bersangkutan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus dapat membuka ruang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam seluruh proses pembangunan.

Problem partisipasi di daerah (dalam Depsos RI, 2005:7) adalah berkenaan dengan belum dimilikinya mekanisme dialog yang efektif, khususnya dalam menangani isu-isu pembangunan, sehingga yang muncul lebih sebagai komunikasi satu arah dimana Pemerintah daerah memberikan instruksi dan perintah sementara masyarakat hanya menerima dan melaksanakan keputusan yang ada. Keikutsertaan masyarakat sangat minim dalam proses-proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak sebagai warga sangat sedikit, juga sering muncul keengganan dari Pemerintah karena biasanya proses pengambilan keputusan akan berjalan alot jika melibatkan banyak pihak.

Pemerintah daerah dan legislatif daerah harus mampu memfasilitasi potensi sektor swasta dan inisiatif pemerintah, sehingga kebijakan yang keluar merupakan presentasi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan Pemerintah semata. Selain itu, perlu ditumbuh-kembangkan partisipasi berbagai lembaga dan organisasi dalam masyarakat seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga kepemudaan, lembaga wanita dan lembaga lainnya yang dikategorikan sebagai pemimpin informal secara aktif dalam pengambilan keputusan,

pelaksanaan, pengendalian jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai adalah terbangunnya mekanisme partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan sosial secara demokratis. Keikutsertaan masyarakat dalam mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat merupakan sarana kontrol yang sangat baik, karena menumbuhkan "*sense of belonging*" terhadap daerah dengan semua problem yang dimilikinya. Jika masyarakat semakin berdaya, maka kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan juga semakin kecil. Selain itu jika mekanisme partisipasi dan pengawasan sosial terbangun, akan memperkecil cara-cara penyampaian aspirasi yang bersifat kekerasan dan pemaksaan. Untuk itu perlu dikembangkan dan diperankan komponen-komponen masyarakat seperti pemimpin informal untuk menyampaikan aspirasi ataupun sebagai alat untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat umum.

Program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola usaha kelompok bersama yang disebut dengan KUBE merupakan usaha Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada dan menekan pada prinsip partisipasi sosial. Menurut Rappaport (dalam Warsito, dan Teguh Yuwono, 2003) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Sedangkan menurut Sweft and Levin, (dalam Giarci, 2001) Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Ditinjau dari segi proses menurut Parson (dalam Giarci,

2001) Pemberdayaan adalah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Jika merujuk pada berbagai pengertian pemberdayaan tersebut di atas, ada suatu kesamaan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Indikator keberdayaan yang dapat menunjuk seseorang itu berdaya atau tidak pada sebuah program pemberdayaan sosial (misalnya keluarga miskin) menurut Schuler, Hashei dan Riley (dalam Suharto, 2004) ada delapan indikator yang mereka sebut *empowerment indeks* yaitu :

1. Kebebasan mobilitas : kemampuan individu pergi kewilayah lain seperti ke pasar, bioskop, fasilitas medis, rumah ibadah.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.
3. kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu membeli barang-barang sekunder atau tersier.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

4. Konsep Masalah Kemiskinan

Masalah sosial kemiskinan merupakan isu sentral di tanah air terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional. Masalah kemiskinan pada hakekatnya

merupakan persoalan klasik, karena hingga saat ini belum ada rumusan atau formula yang dianggap paling baik atau jitu dalam penanganan kemiskinan. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 1981). Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang bermatra multi dimensional, SMERU misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto et.al. 2004:7:8) :

1. Ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan (tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya sumber daya manusia dan alam.
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
7. Ketidak mampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental.

Definisi lainnya dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar “kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak “ (DEPSOS, 2004:3) dalam definisi ini kebutuhan dasar atau pokok meliputi kebutuhan makanan, perumahan, perawatan kesehatan dan pendidikan. Penentuan ukuran kemiskinan di Indonesia selama didominasi oleh dua pendekatan: yakni, *Pertama*, pendekatan pemenuhan konsumsi *per kapita*

(menggunakan garis kemiskinan dan bersifat makro). Tipologi kemiskinan dewasa menggunakan empat kategori yakni kemiskinan :

- a. Absolut yaitu kemiskinan yang diakibatkan ketidak mampuan atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pendidikan, pakaian, kesehatan, transportasi dalam lain-lain.
- b. Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dialami individu atau kelompok yang dibandingkan dengan kondisi umum.
- c. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan struktur (ekonomi, sosial dan Politik) yang tidak memungkinkan seseorang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang tersedia bagi mereka.
- d. Kemiskinan Kultural yaitu kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya, nilai orientasi sosial yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat Modern) .

Dewasa ini penetapan kemiskinan Indonesia selama menggunakan alat ukur berdasarkan konsep kemiskinan absolut yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan makanan, yakni sejumlah uang yang diperlukan individu untuk membeli makanan setara 2,100 kalori per orang perhari. Sedangkan kebutuhan non makanan seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan barang jasa lainnya belum dijadikan indikator yang memadai.

Ketika *mainstream* pembangunan daerah condong pada *human resources quality*, serta merta masalah kemiskinan diposisikan sebagai hambatan dan ancaman besar yang harus dicari solusinya secara tepat dan segera. Berkaitan hal tersebut dewasa ini mulai terjadi pergeseran konsep alat ukur ciri rumah tangga kemiskinan seperti yang digunakan Depsos dan PBS adalah dalam program BLT sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Lantai tempat tinggal tersebut dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000/bln.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-seperti sepeda motor (kredit/nonkredit) lunas, berumah kapal motor atau bank modal lainnya.

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi yaitu kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan layak atau kebutuhan dasar pokok minimal yang dimaksud kebutuhan dasar pokok menurut Departemen Sosial RI meliputi kebutuhan makanan, pendidikan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Isu kemiskinan merupakan masalah yang senantiasa aktual oleh karena itu pengkajian konsep kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang krusial. Karena pendekatan-pendekatan mengukur kemiskinan yang dipergunakan tidak membuka peluang bagi suara dan aspirasi miskin, dengan demikian definisi kemiskinannya tidak cukup layak untuk memahami realitas kemiskinan yang sesungguhnya terjadi.

Permasalahan lainnya dari ukuran kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan itu belum mampu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi sehingga mengingkari persoalan yang menjadi akar masalah atau sebab-

musabab kemiskinan seperti konsep kemiskinan masih didominasi oleh perspektif tunggal, yakni kemiskinan pendapatan. Pendekatan ini tidak menggambarkan potret kemiskinan secara lengkap kemiskinan seolah-olah masalah ekonomi. Akibatnya aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya belum tersentuh secara memadai, sistem pengukuran dan indikator terfokus pada "kondisi" atau "keadaan" kemiskinan berdasarkan faktor-faktor ekonomi yang dominan. Orang miskin hanya dipandang sebagai "orang yang serba tidak memiliki" atau tidak memiliki pendapatan yang tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dan sebagainya. Metodanya masih berpijak pada *outcome indicators* sehingga belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan.

Si miskin dilihat hanya sebagai korban pasif dan objek penelitian bukan sebagai manusia yang memiliki sesuatu (*human being*) yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kondisi kehidupan maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukannya sendiri. Akibatnya pendekatan yang dipergunakan tersebut membawa konsekuensi operasionalisasi teknis kegiatan penanggulangan kemiskinan menjadi *pendekatan ekonomi* yang bersifat *charity* (kedermawanan), dan itu berarti si miskin menjadi obyek dari suatu aktivitas yang bersifat proyek dan yang sesungguhnya hanya mampu menjawab masalah dalam jangka pendek. Pendekatan yang dilakukan juga belum dapat menyumbang bagi proses demokratisasi karena hanya menghasilkan pola hubungan *subordinat* di mana "pengendali proyek" penanggulangan kemiskinan sebagai "si dermawan" dan lapisan miskin sebagai "yang terpilih untuk dikasihani".

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, perlu suatu perubahan konsep yang mengacu pada keberfungsian sosial yang dilakukan individu atau kelompok

dalam melaksanakan usaha pemenuhan kebutuhannya. Konsep keberfungsian sosial menunjukkan bagaimana kapabilitas individu, keluarga, atau masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar dari dan keluarga serta dapat memberi kontribusi positif dalam masyarakat (dalam Edi Suharto, 2005: 50). Pendekatan ini menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang realistis dan komprehensif dan si miskin bukan sebagai objek akan tetapi mempunyai kemampuan dalam merespon dan mengatasi masalah seputar kemiskinan.

Merujuk dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa kemiskinan adalah suatu masalah mendesak untuk ditanggulangi/diberantas, dalam arti dicari solusi yang tepat. Namun upaya pemberantasan kemiskinan harus didukung oleh strategi yang matang, akurat, operasional dan berkesinambungan. Oleh karena itu menurut Departemen Sosial RI (dalam buku petunjuk pengembangan KUBE 2004) ada 4 (empat) poin yang diajukan sebagai pendekatan keberfungsian sosial dan studi kemiskinan :

1. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinan, termasuk efektivitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program pengentasan kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.
2. Indikator untuk mengukur kemiskinan tidak tunggal, melainkan indikator komposit lainnya.
3. Konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dari pada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi kemiskinan.
4. Pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa indikator yang mencakup kemampuan:
 - a. Memperoleh mata pencarian (*livelihood capabilities*)
 - b. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*)
 - c. Mengelola asset (*asset management*)
 - d. Menjangkau sumber-sumber (*access to social capital*)
 - e. Menghadapai goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

- f. Sedangkan indikator kuncinya bagaimana kemampuan jaringan sosial atau lembaga-lembaga sosial memperoleh SDM dan SDA dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam usaha pemberdayaan keluarga miskin tersebut.

Berkenaan dengan empat point tersebut diatas pada dasarnya pengentasan kemiskinan yang paling efektif adalah melalui pola pemberdayaan. Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya mengarahkan pada perubahan sosial melalui proses pendewasaan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian akan tercipta kondisi dimana masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan dalam meningkatkan kesejahteraannya (*social adjustment*).

5. Pendampingan

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui bantuan usaha uersama (KUBE) tidak akan dapat berjalan secara maksimal jika organisasi pelaksana baik ditingkat kabupaten sampai di desa tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perannya. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola kelompok usaha bersama adalah pendamping kelompok, petugas pendamping lapangan menurut petunjuk teknis Dirjen Bantuan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI Tahun 2004 adalah Petugas Sosial Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di Tingkat Desa / Kelurahan.

Pendamping (dalam buku Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2006-2010, Depsos RI, 2005). adalah Perorangan, Kelompok atau lembaga yang memiliki kopetensi dibidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomis produktif melalui KUBE dan LKM. Pendampingan merupakan salah satu strategi

yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola kelompok usaha bersama (KUBE). Pendampingan sosial diartikan sebagai interaksi yang dinamis antara kelompok miskin dengan pekerja sosial untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan seperti :

1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi melalui KUBE.
2. Memobilisasi sumber daya setempat secara bergotong royong.
3. Memecahkan masalah sosial kelompok.
4. Menciptakan atau membuka akses bagi peningkatan, pengembangan dan pemenuhan kebutuhan kelompok.
5. Menjalinkan kerja sama antar kelompok dan berbagai pihak dalam konteks pengembangan usaha ekonomis kelompok.

Merujuk pada pendapat Payne (dalam Isbandi, Rukminto Adi, 2002: 26) prinsip utama pendampingan sosial adalah "*making the best of client's resources*" artinya kalayan (anggota Kelompok) sebagai kekuatan (*strength perspective*) mereka dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai kekuatan positif yang bermanfaat dalam proses pemecahan masalah. Menurut Iff (dalam Isbandi, Rukminto Adi, 2002: 199) seorang Pendamping harus mampu melakukan animasi sosial yaitu kemampuan untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat termasuk didalamnya mengaktifkan menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak

Pendampingan sosial dalam kaitan pemberdayaan keluarga miskin mempunyai tugas atau fungsi menurut Suharto (2005:34) sebagai berikut:

1. Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi yaitu sebagai contoh, mediasi dan negosiasi dalam membangun konsensus bersama untuk memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber yang dapat dijangkau klien (kelompok).
2. Penguatan (*empowering*) fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*), pendamping sebagai agen dalam memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk membangkitkan kedisaran masyarakat.

3. Perlindungan (*protecting*) yaitu pendamping sebagai konsultan dalam usaha pemecahan masalah yang menjadi penghambat kelompok. Disamping itu juga sebagai sebagai penghubung dengan lembaga ekseternal demi kepetingan kelompok masyarakat.
4. Pendukungan (*supporting*) yaitu mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis dalam mendukung dalam terjadinya perubahan positif.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas menurut Parsons, Jorgensen dan herndez (dalam Isbandi, Rukminto Adi, 2002: 45) mengungkapkan ada 5 (lima) peran pekerja sosial dalam pendampingan sosial yaitu sebagai : (1) Fasilitator, (2) Broker, (3) Mediator, (4) Pembela (advokad) dan (5) pelindung (*protector*). Sedangkan menurut Compton dan Galaway (dalam Edi Suharto, 2005:51) terdapat lima aspek yang dapat dilakukan pendampingan sosial melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat (dalam kaitan pemberdayaan kelompok) yaitu :

1. Mendorong masyarakat untuk memahami nilai-nilai kebersamaan, interaksi sosial melalui pemahaman akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Misalnya keluarga miskin didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme dari kelembagaan kemudian dimotivasi, dibimbing untuk dapat meningkatkan pendapatan dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan keahlian dalam usaha pemenuhan kebutuhan.
3. Manajemen diri yaitu mengembangkan sebuah sistem dimana kelompok dapat memilih pemimpinnya sendiri (ketua kelompok) dengan memberikan arahan untuk melakukan pencatatan, pertemuan dan mengatur kelompok.

4. Pengembangan sistem penghimpunan seperti iuran kelompok dengan harapan menjadi sumber yang dapat dikembangkan secara bersama.
5. Pengembangan jaringan yaitu peningkatan kemampuan untuk mempertahankan dan membangun jaringan berbagai sistem sosial lainnya.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar implemmentasi program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan usaha kelompok bersama dapat efektif yaitu organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tehnik pekerjaan / pelayanan sosial, isi pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

6. Pelayanan Sosial

Menurut Achlis (dalam Suharto, 2005: 18) Pelayanan Sosial bukan hanya sebagai usaha-usaha pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan fungsi sosial individu melainkan sebagai usaha melayani berfungsinya kolektivitas-kolektivitas seperti masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan dan kemampuan. Sedangkan Muhidin (dalam Suharto 2005:17) mengungkapkan Pelayanan Sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir yang bertujuan untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi dan mengatasi masalah penyesuaian sebagai akibat dari pada pola perubahan masyarakat melalui tindakan yang kooperatif.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa Pelayanan Sosial memuat :

1. Merupakan usaha kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial dengan kegiatan yang terorganisir yang didasari oleh metode Pekerjaan Sosial.
2. Bentuknya memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat yang mengalami hambatan dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk menciptakan kondisi yang sejahtera.
3. Sasaran pelayanan sosial adalah individu, kelompok dan masyarakat.

Fungsi pelayanan sosial menurut Achlis (dalam Suharto, 2005:36) adalah perbaikan kondisi kehidupan secara berkelanjutan, mengembangkan dan memberdayakan sumber dan potensi manusia serta meningkatkan orientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri. Dalam penerimaan pelayanan bantuan sosial pemberdayaan keluarga miskin diikat dalam kelompok usaha bersama atau KUBE yaitu merupakan pembelajaran kepada masyarakat untuk berorganisasi.

7. Organisasi

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (dalam buku Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2006-2010, Depsos RI, 2005) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama .

Sedangkan menurut Robbins (dalam ADPU 4341:1.3) menyatakan “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memuat unsur-unsur (a). Kesatuan sosial yang dikoordinasikan, (b) adanya batasan relatif dapat

diidentifikasi, (c) Adanya keterikatan, (d) Adanya tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu melakukan pengorganisasian, pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian. Menurut George R. Terry (dalam Suharto : 2005) pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari pendapat di atas, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Menurut Handoko (2000:169) proses ini akan tercermin pada struktur organisasi yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan pengorganisasian, yaitu: (1) pembagian kerja, (2) departementalisasi, (3) bagan organisasi formal, (4) rantai perintah dan kesatuan perintah, (5) tingkat-tingkat hirarki manajemen, (6) saluran komunikasi, (7) penggunaan komite, serta (8) rentang manajemen”.

8. Monitoring dan Evaluasi

Pencapaian tujuan dari organisasi tidak dapat kita nilai jika tidak dilakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi program sosial yang diberikan. Monitoring dan Evaluasi dalam kontek pembangunan kesejahteraan sosial mencakup pertanyaan

tentang (1) Apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan, (2) Apakah program tersebut telah menjangkau sasaran pelayanan (target groups) secara maksimal, (3) Apakah metode atau cara pemberian layanan dapat diterapkan, (4) apakah tenaga pelaksana telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, (5) Apa bentuk rekomendasi yang diusulkan untuk pelayanan dimasa akan datang.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan tersebut dapat dilaksanakan diperlukan suatu bentuk usaha pemantauan dan evaluasi. Menurut Marjuki (dalam Suharto, 2005:78), Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses pengumpulan informasi dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah mengetahui masukan (inputs) sumber-sumber dalam rencana digunakan, bagaimana implemetasinya, apakah rentang waktu terpenuhi secara tepat, apakah setiap aspek dalam perencanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana program. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (externalitas). Hal ini didukung oleh pendapat Wibawa (2004:8) bahwa “evaluasi dalam beberapa hal serupa dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemantauan”.

Menurut Dunn (2000:68) “istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan di mana masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assegment*) yaitu kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti

satuan nilainya". Dalam arti yang lebih spesifik evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna.

Selanjutnya, apabila dilihat dari fungsinya, Dunn (2000 : 609 – 611) mengatakan paling tidak ada tiga fungsi evaluasi, yakni '(1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; (2) memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi".

Atas dasar beberapa pendapat tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa inti dari evaluasi suatu program adalah (1) untuk menilai keberhasilan suatu program, (2) untuk melihat seberapa baik program tersebut dilaksanakan, (3) mendapatkan masukan berupa pemikiran-pemikiran yang pada gilirannya akan dapat dimanfaatkan guna membuat keputusan berikutnya, (4) menciptakan peningkatan program di masa mendatang.

Menurut Owen dan Rogers (dalam Dunn, 2000) terdapat 5 (lima) objek sasaran yang dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi yaitu : (1) Program, adalah seperangkat aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu perubahan tertentu, (2). Kebijakan, adalah prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dalam mencapai tujuan tertentu, (3) Organisasi, adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati, (4) Pruduk atau hasil adalah keluaran atau out put yang

dihasilkan dari hasil proses kegiatan tertentu, (5) Individu adalah orang yang ada dalam organisasi atau masyarakat yang memfokuskan kepada kemampuan melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam organisasi atau masyarakat.

Evaluasi suatu proyek atau kegiatan pada dasarnya adalah suatu pemeriksaan secara sistematis terhadap masa lampau yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan hari depan secara lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada mencari kesalahan-kesalahan di masa lalu dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan tujuan kegiatan, atau dengan kata lain tujuan evaluasi adalah untuk penyempurnaan kegiatan di masa mendatang.

Menurut Van Dusseldorp (dalam Wahab, 2000:29): Studi evaluasi dapat dibedakan berdasarkan 2 (dua) kriteria pokok, siapa yang melaksanakan evaluasi itu dan pada tahapan perencanaan pembangunan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan. Kalau evaluasi itu berlangsung sebelum kegiatan dilaksanakan, maka evaluasi itu disebut *evaluasi ex ante*. Sedangkan jika evaluasi tersebut berlangsung sesudah dilaksanakan, disebut *ex post*. Evaluasi *ex post* paling tepat jika dilakukan dengan cara meninjau secara menyeluruh dan sistematis terhadap proyek yang ada.

Berdasarkan pada waktu pelaksanaannya terdapat dua macam evaluasi (Dipohusodo, 1996:64), yaitu "*evaluasi summatif* yang dilakukan setelah kegiatan berakhir dan *evaluasi formatif* dilaksanakan pada saat kegiatan/proyek sedang berjalan". Evaluasi *summatif* bermanfaat untuk digunakan merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan kegiatan/proyek-proyek serupa lainnya di masa mendatang. Evaluasi *formatif* digunakan untuk keperluan penyesuaian dan perencanaan ulang atas

kegiatan/proyek yang sedang berjalan. Perencanaan evaluasi harus sudah dipertimbangkan pada saat menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dan paling lambat disiapkan pada tahap-tahap awal pelaksanaan.

Mempertimbangkan kebutuhan - kebutuhan pada evaluasi secara lebih dini berarti penyusunan logika proyek berlangsung lebih realistis, sehingga dapat menentukan informasi dan menyiapkan data-data indikator yang diperlukan. Karena untuk dapat mengevaluasi sesuatu proyek harus berlandaskan pada pengertian apa yang diharapkan dapat dicapai oleh proyek, sehingga dengan sendirinya harus menggunakan perangkat kerangka logis.

B. Kerangka Berpikir.

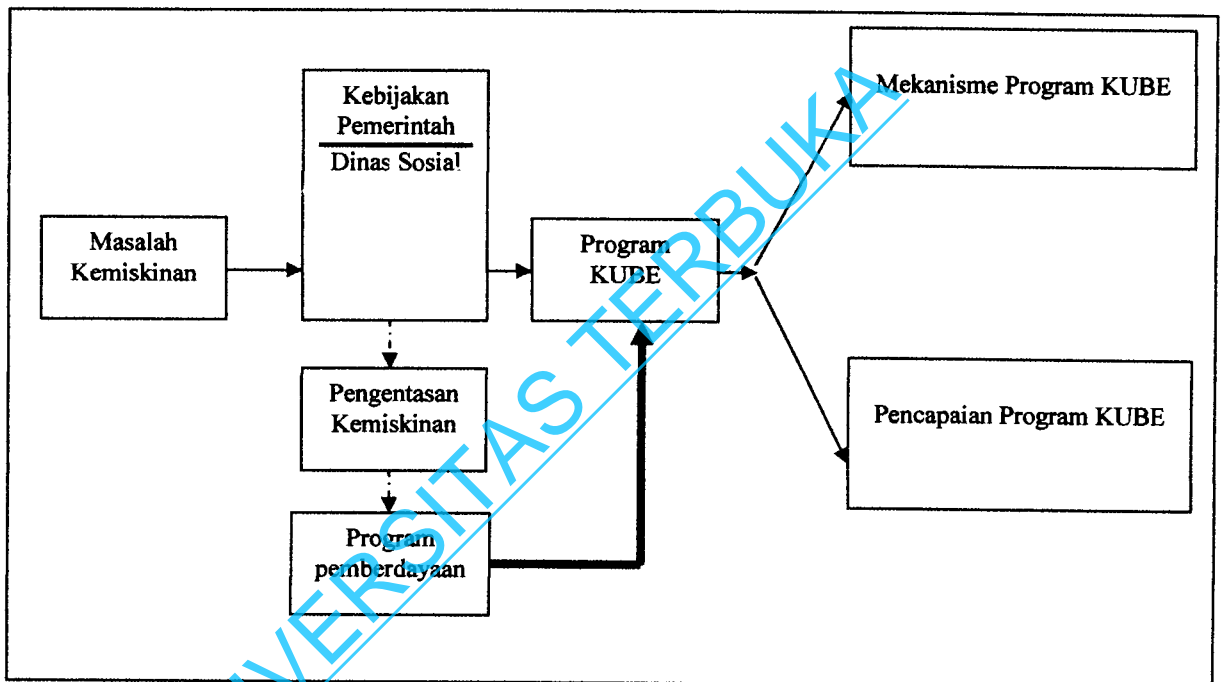
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan didasari oleh keinginan peneliti mengkaji masalah kemiskinan yang terjadi di daerah Kabupaten Sintang. Selama ini pemerintah pusat sebenarnya telah membuat atau merancang suatu kebijakan tentang pengentasan kemiskinan melalui sebuah kebijakan berupa program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah program kelompok usaha bersama (KUBE).

Kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program KUBE di Kabupaten Sintang sudah berjalan dan berlangsung di beberapa kecamatan dan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berupaya mengkaji sampai sejauhmana program KUBE yang telah dilaksanakan di lapangan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau terdapat kendala-kendala dalam implementasinya. Baik menyangkut mekanisme atau proses kegiatan program KUBE, pencapaian hasil dari

program KUBE serta dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat penerima program KUBE di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

Lebih jelasnya mengenai kerangka berfikir peneliti akan disajikan dalam alur berfikir sebagai berikut.

Gambar 2.1. Alur Berfikir Penelitian



C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diambil penulis dalam tesis ini yaitu " Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) ". Maka *defenisi konsepnya* dapat penulis uraikan sebagai berikut : Implementasi adalah "suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program ", untuk mengoperasikan ini berisi "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan disini adalah upaya untuk meningkatkan, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh segenap masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan pemberdayaan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mempunyai kesadaran untuk membangun bersama dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan rasa memiliki terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga sarana dan prasarana yang dibangun bersama dapat dijaga dan dipelihara yang tidak hanya mengandalkan atau mengharapkan ulur tangan pemerintah saja.

Kemiskinan dimaksudkan disini merupakan kondisi berhubungan dengan kekurangan tentang kebutuhan dasar yang semestinya dipenuhi berupa Kebutuhan

Hidup Minimum (KHM). Yang dimaksud KHM yakni suatu batas kebutuhan dasar yang dapat membuat seseorang atau sekelompok orang hidup secara wajar/layak dalam kehidupan sosial tertentu. KHM bersifat relatif, artinya berlaku secara spesifik di wilayah tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat upah, harga dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan disini pada hakekatnya mengarahkan pada perubahan sosial melalui proses pendewasaan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi tantangan. Evaluasi suatu program dimaksudkan disini adalah untuk menilai keberhasilan suatu program, seberapa baik program tersebut dilaksanakan, mendapatkan masukan berupa pemikiran-pemikiran yang pada gilirannya akan dapat dimanfaatkan guna membuat keputusan berikutnya, dan menciptakan peningkatan program di masa mendatang.

Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE (Usaha Bersama) merupakan konsep yang terkait dalam sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan (welfare) yang menyangkut kualitas hidup manusia dan pemberian pelayanan kolektif guna melindungi kesejahteraan rakyatnya.

Sedangkan definisi Operasional dari judul Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebagai berikut. Penanganan kemiskinan komprehensif tampaknya sudah menjadi kesepakatan umum yang perlu ditindaklanjuti dengan berbagai program aksi yang lebih menyentuh pada sasaran dan penyelesaian mendasar. Mata

rantai masalah kemiskinan dipahami sebagai lingkaran yang memiliki banyak dimensi yang menyangkut pada berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin. Pendekatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Pengembangan Usaha Keluarga Binaan Sosial (PUKBS) melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), merupakan salah satu alternatif pendekatan dalam upaya percepatan penanganan masalah kemiskinan perlu terus ditingkatkan dan dilihat tingkat efektivitas.

Berdasarkan buku petunjuk pengembangan usaha keluarga binaan sosial dalam KUBE yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial (2004), KUBE adalah kelompok usaha bersama yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial (KBS) untuk melaksanakan kegiatan usaha otonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) dalam rangka kemandirian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Melalui sistem KUBE, kegiatan usaha yang semula dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian disatukan dalam kelompok, sehingga akan memudahkan dalam pembinaan dan monitoring kegiatan usahanya. Disamping itu, para anggota kelompok ini dapat saling kerja sama secara lebih mudah dibandingkan bila mereka saling berpencar. Dampak lainnya yang diharapkan dari kegiatan KUBE yaitu kepedulian dan kesetiakawanan sosial dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dilingkungannya untuk ikut serta dalam proses produksi yang dilakukan oleh para anggota KUBE. Dengan demikian, bukan saja anggota KUBE yang meningkat penghasilannya, tapi masyarakat sekitarnya merasakan manfaat keberadaan KUBE.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Suatu penelitian agar berhasil dengan baik diperlukan suatu desain yang tepat, desain yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka rancangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian deskriptif. Alasan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang Tahun 2007.

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang, dengan pertimbangan bahwa sesuai data yang diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Kecamatan Kelay Permai merupakan daerah yang menerima bantuan KUBE yang jumlahnya relatif lebih besar dibanding dengan daerah lainnya yaitu sebanyak 6 (enam) kelompok KUBE atau sebanyak 60 kepala keluarga, selain itu para keluarga miskin yang ada di Kecamatan ini, memiliki latar belakang permasalahan yang kompleks yaitu kemiskinan yang terjadi tidak saja didasari oleh faktor ekonomi semata, namun disebabkan juga oleh faktor pendidikan, lapangan pekerjaan dan lokasi yang terpencil.

Selanjutnya, dalam proses waktu penelitian ini terjadi perubahan SOPD (Susunan Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Sintang dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Maka dalam penelitian ini Peneliti mengambil data dan informasi kepada orang-orang yang terlibat ketika institusi Dinas Sosial masih bernama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan orang-orang yang terlibat pada jajaran organisasi dan tatakerjanya.

Adapun alasan pemilihan lokasi di daerah ini adalah:

1. Pertimbangan praktis adalah Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kelam Permai yang menerima bantuan program tersebut Tahun 2007.
2. Pertimbangan metodologis adalah tersedianya data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Populasi Sampel

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan pangkal yaitu mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, Camat Kelam Permai, Pendamping dan Kepala Desa Sungai Pukat.

2. Informan kunci dalam penelitian yaitu 10 orang, terdiri satu orang ketua dan satu orang anggota dari “KUBE SEJAHTERA SATU”, satu orang ketua dan satu orang anggota dari “KUBE EJAHTERA DUA”, satu orang ketua dan satu orang sekretaris dari “KUBE SEJAHTERA TIGA”, satu orang ketua dan satu orang sekretaris dari “KUBE LEBI”, satu orang sekretaris dari “KUBE TERATAI INDAH SATU” dan Satu orang ketua dari “KUBE TERATAI INDAH DUA”

Sasaran penelitian secara umum adalah masyarakat miskin yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kelam Permai. Namun guna memperjelas kriteria dalam penelitian, maka secara khusus sasaran penelitian adalah: keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok KUBE yaitu berjumlah 6 (enam) kelompok, dimana masing-masing kelompok berjumlah 10 (sepuluh) orang kepala keluarga dengan keseluruhan jumlah anggota KUBE sebanyak 60 (enam puluh) kepala keluarga (KK).

Berhubungan jumlah kelompok KUBE begitu besar, maka dalam penelitian ini penulis membatasi jumlah sasaran penelitian sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik purposive. Untuk menentukan jumlah tersebut peneliti ambil dari beberapa orang dari setiap KUBE sebagai informan dalam penelitian ini yang secara kebetulan dapat ditemui penulis. Penggunaan tehnik purposive dengan pertimbangan bahwa peserta anggota KUBE sudah diketahui dan dikenal oleh penulis sehingga dapat memudahkan pengumpulan data dan informasi. Sedangkan untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap sebanyak 6 (enam) orang dijadikan informasi pangkal.

C. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (1998:114) sumber data penelitian adalah “sumber data dalam penelitian darimana data dapat diperoleh”. Apabila peneliti menggunakan wawancara dan pengamatan langsung dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber datanya.

Penelitian ini merupakan studi kasus yaitu melatih untuk menggambarkan dan menerangkan banyak komponen yang memberikan situasi sosial, kajian yang diteliti dalam penelitian studi kasus yaitu penelitian Implementasi kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang. Melalui pengkajian penelitian dengan studi kasus, masalah penelitian dapat dikaji secara mendalam (*deeply described*) sehingga akan dapat diungkapkan proses implementasi kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE dari awal perencanaan, penyaluran bantuan dan pembinaan serta pengembangan KUBE.

Sesuai dengan sifat penelitian kasus, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada penerima bantuan sosial dan pelaksana program, selanjutnya berusaha mengevaluasi implementasi di lapangan dengan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum yang bersifat sementara sebagai bahan informasi selanjutnya. Dalam studi kasus ini, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan langsung di

daerah dimana penelitian ini dilaksanakan. Sedangkan variabel yang digunakan adalah variabel deskriptif atau disebut juga *varibel low inference* yang bebas dari penilaian atau inferensi dari pengamat seperti apa adanya dilapangan (*as it is*). Dengan indikatornya proses implementasi kebijakan program, kepatuhan pelaksana kebijakan, tujuan dan isi kebijakan dan dampak implementasi kebijakan.

D. Prosedur Pengumpulan Data.

Suatu penelitian memerlukan adanya tehnik penelitian guna mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan jenis perolehannya data terdiri dari: data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang tersedia dan diperoleh sebagai hasil pengolahan data primer atau data menyangkut keadaan sesungguhnya dari sesuatu kondisi. Sedangkan data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui alat pengumpul data seperti wawancara, angket dan observasi. Untuk itu, agar proses pengumpulan data berlangsung secara teratur, logis dan sistematis perlu dilakukan persiapan instrumen, sumber data, operator instrumen dan persiapan pengumpulan data (Prasetya Irawan, MAPU 5103, 2006 : 10.2). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab melalui tatap muka secara langsung dengan informan kunci.
2. Observasi yaitu pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

3. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui *questionnaire* yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi yang diperlukan melalui teknik ini adalah pengumpulan beberapa catatan-catatan atau laporan-laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui pola bantuan kelompok usaha bersama.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dilakukan dalam dua bentuk yaitu (1) wawancara terbuka artinya penulis melakukan wawancara sehubungan dengan kajian penelitian ; dan (2) wawancara dengan pendekatan yang menggunakan petunjuk umum wawancara. Teknik wawancara terbuka digunakan pada saat melakukan wawancara dengan subyek penelitian tanpa terlebih dahulu direncanakan namun mendapatkan data apa adanya tanpa disusun secara sistematis. Sebagaimana dikemukakan Nisbet dan Watt (dalam Nawawi, 1983: 31), sifat khas dari wawancara studi kasus adalah yang lebih longgar susunannya, maka pelaksanaan wawancara sifatnya adalah berdialog yaitu dengan memberikan tanggapannya dengan caranya sendiri atau secara bebas. Sebaliknya dalam situasi yang demikian dimungkinkan bagi peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan secara mendalam.

Selanjutnya wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum, dimana peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara sebagai acuan dalam memberikan pertanyaan kepada subyek penelitian dengan cara fleksibel sehingga diperoleh data yang sangat diperlukan dalam wawancara tersebut. Sedangkan data sekunder yang diperlukan adalah mengenai keadaan geografis, penduduk, mata pencaharian, keadaan pendidikan, struktur sosial masyarakat dan lain sebagainya baik

diperoleh dari dokumen Kantor Kecamatan, dan Desa serta instansi yang terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui pengamatan, wawancara dan dokumen, yaitu dokumen-dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan-peraturan, Peraturan Daerah dan sebagainya yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang berarti penelitian harus berperan aktif dalam kegiatan penelitian. Dengan demikian, penelitian harus melihat, mendengar dan bertanya secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Selanjutnya hasil dari wawancara terhadap informan dan dikombinasikan dengan hasil observasi diharapkan dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara terhadap sejumlah informan pangkal dan informan pokok dipakai untuk pengumpulan data pada masyarakat yang kompleks (Moloeng, 1993:31). Kombinasi hasil observasi dengan hasil wawancara kepada informan pangkal dan informan pokok dapat memberikan data lengkap dan komprehensif dalam menjawab masalah penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis

deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan pertama data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pemisahan-pemisahan atau pengkategorian, pengklasifikasian sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan suatu analisis yang lebih komprehensif dan mendalam melalui penafsiran data dan pemeriksaan data atau verifikasi.

Reduksi kata bermakna menggolongkan, mengkategorisasikan dan mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya. Dalam melakukan pekerjaan reduksi ini, kegiatan yang dilakukan adalah membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga supaya tetap berada di dalamnya dari data yang diperoleh yaitu dengan menyusunnya ke dalam bentuk satuan-satuan dari berbagai sumber seperti hasil wawancara dan observasi di lapangan sehingga dapat diidentifikasi.

Langkah terakhir dalam analisis data dengan melakukan penafsiran data, ada dua langkah dalam melakukan penafsiran data yaitu menemukan kategori dan interogasi terhadap data. Kategori bermakna mengelompokkan data-data dari informan yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian yang diteliti. Kegiatan interogasi terhadap data, yaitu dengan mengajukan seperangkat pertanyaan sehingga dapat mengungkapkan banyak persoalan dari data itu sendiri..

Hasil interogasi data tersebut dapat diketahui apakah data telah terkumpul sudah sesuai dengan masalah yang akan diteliti atau belum untuk mengungkapkan permasalahan sehingga dapat iinterpretasikan sampai dimana data dan informasi yang

telah (atau belum mendukung. Proses interpretasi, akan menjadi sumber bagi peneliti untuk memberikan makna sesuai dengan pernyataan mereka, selanjutnya peneliti dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan cara mengabstraksikan keseluruhan dari makna tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka dibantu untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial. Terdapat 6 macam tujuan terbentuknya KUBE, yaitu: (1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga binaan sosial (KBS) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS), (2) Meningkatkan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui iuran kesetiakawanan sosial (IKS), (3) Meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan usaha ekonomis prukduktif. Kelompok, (4) Mampu menyalurkan hasil usahanya untuk ditabung guna menghadapi keperluan mendadak sebagai tambahan modal, (5) Terbinanya kegiatan anggota keluarga, dan (6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga binaan sosial dan terbinanya usaha jaminan kesejahteraan sosial (JKS) yang berbasis masyarakat melalui iuran kesetiakawanan sosial.

Secara khusus, tujuan diselenggarakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok KUBE, antara lain: meningkatkan

taraf kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan, serta meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

a. Mekanisme Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE Fakir Miskin

Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2007 sebagaimana data yang diperoleh dapat penulis sajikan sebagai berikut. Program bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin salah satu yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang pada tahun 2007, bersumber dari dana dekonsentrasi dimana penanggung jawab pelaksana berada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan bagi fakir miskin, dikemukakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota KUBE adalah: Berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Susenas / BPS tahun 2002, Keluarga fakir miskin dengan penghasilan per orang per bulan Rp. 96.512,- (Rp. 482.560,-/KK/bulan) untuk pedesaan, dan Rp 130.499,- (Rp.652.495,-/KK/bulan) untuk perkotaan,

Tingkat pendidikan pada umumnya rendah : tidak tamat SLTP, dan tidak ada ketrampilan tambahan.

Mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE fakir miskin, menurut buku panduan umum pengembangan usaha ekonomi produktif fakir miskin melalui KUBE (2004) mencakup dua hal: Mekanisme bantuan dan bantuan dana fasilitas kredit. Mekanisme bantuan dana dekonsentrasi untuk penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2003 dan untuk seterusnya diperkuat dengan dukungan dana melalui fasilitas pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan bantuan dana dekonsentrasi diberikan oleh provinsi kepada Kabupaten/Kota penerima program sesuai usulan yang diberikan, yang sebelumnya melalui proses perencanaan dan usulan di tingkat bawah yaitu oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui Petugas Sosial Kecamatan/Kasi Kemasyarakatan kantor kecamatan setempat/Pekerja Sosial Masyarakat yang meliputi proses : Pendataan keluarga miskin, Pendataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kebutuhan masyarakat setempat; Memberikan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten setempat untuk diteliti sebagai kelayakan program, diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi sebagai usulan program pemberdayaan keluarga miskin melalui pola bantuan KUBE.

Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dan penentuan lokasi, pihak Dinas Sosial Provinsi melakukan sosialisasi dan koordinasi/ konsultasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota tentang alokasi kelompok dan besaran bantuan yang akan disalurkan. Kemudian pihak Dinas Sosial Provinsi bersama pihak Dinas

Sosial Kabupaten melakukan seleksi dan sosialisasi program di lapangan, tahap selanjutnya membentuk kelompok-kelompok, pengurus dan pematapan. Penyaluran bantuan stimulan kegiatan satu paket dengan bantuan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten / Kota. Pembinaan, pelatihan dan bimbingan oleh aparat Dinas Sosial Propinsi di lapangan secara terpadu dengan aparat Dinas Sosial Kabupaten / Kota. Bantuan yang diberikan ditumbuh kembangkan oleh KUBE sampai mandiri dan digulirkan kepada anggota KUBE lain melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) setelah KUBE memiliki modal yang cukup untuk memperluas usaha ekonominya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada informan (mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang yaitu Drs. Djoko, M. Saparto, MM). Beliau menyatakan program bantuan sosial bagi keluarga miskin pola kelompok usaha bersama (KUBE) sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2007 dananya bersumber dari dana dekonsentrasi, dimana segala kebijakan teknis berada pada Dinas Sosial Provinsi sedangkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai pelaksana dilapangan sebagaimana pedoman dan petunjuk.

Lebih lanjut nya bahwa program bantuan kesejahteraan sosial dalam bentuk kelompok bagi keluarga miskin merupakan salah satu kebijakan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam usaha pengentasan kemiskinan. Kebijakan program tersebut banyak sekali kendala dalam implementasinya baik dalam tahap proses usulan, pemberian bantuan, pembinaan dan pengembangan. Hal ini menurutnya dikarenakan masih mengacu pada buku pedoman bantuan

KUBE yang diterbitkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2004, dimana peran pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota hanya berkewajiban menyediakan lokasi baik dari usulan, pembinaan dan pengembangan sedangkan kebijakan teknis yang menyangkut keuangan dipegang secara penuh oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Beliau menyatakan idealnya pedoman program tersebut diimbangi dengan dana perbantuan yang dilimpahkan ke Kabupaten atau Kota sehingga daerah akan lebih maksimal dalam mengimplementasikan program tersebut karena memahami karakter daerah dan kemampuan pelaksana di lapangan. Akan tetapi beliau juga tidak memungkiri dengan dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di Kabupaten akan berhasil jika saja alokasi pembangunan kesejahteraan sosial yang bersumber dari dana APBD dapat ditingkatkan sebagai dana pendamping program tersebut. Menurutnya, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak dapat mengalokasikan dana pendamping, hal ini dikarenakan alokasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2007 s/d 2008 sangat terbatas yaitu ± Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah) pertahunnya. Akibat kurang ditopang dengan anggaran pembangunan daerah sebagai dana penguatan, implementasi kebijakan program KUBE tidak dapat berjalan sebagaimana mekanisme yang ditentukan, bantuan tersebut bersifat "*hit and run*" tanpa suatu pembinaan yang berkelanjutan.

Menurut mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang permasalahan tersebut diatas diperburuk dengan tidak adanya lagi jajaran Dinas Sosial di tingkat kecamatan yang dulunya disebut Petugas Sosial

Kecamatan, perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat terencana dengan baik.. Suatu usulan yang baik adalah dimulai dari bawah, oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial peran petugas kecamatan memegang kunci pokok sampai dengan pembinaan, bimbingan dan pengembangan. Selain itu juga ada kendala yang cukup krusial bahwa tenaga teknis yang membidangi program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin belum memahami secara penuh secara teknis tentang program tersebut dikarenakan bukan berlatar belakang dari pekerja sosial. Hal ini juga termasuk saya yang baru duduk di posisi Kepala Dinas sudah barang tentu masih terlalu awam dan menjadi kendala dalam melanjutkan pembinaan program tersebut tambahnya.

Berdasarkan pernyataan mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang tersebut, Peneliti mengkonfirmasi lagi data yang diperoleh dengan Kepala Seksi Bina Organisasi Bantuan Sosial selaku pelaksana teknis di lapangan. Menyatakan bahwa benar bahwa permasalahan tersebut menjadi kendala yang cukup krusial dalam implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui bantuan Sosial pola KUBE di Desa Sungai pukat. Sehingga proses-proses implementasi tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditentukan walaupun demikian program tersebut dapat dijalan dengan berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan pedoman program KUBE.

Lebih lanjut menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa dalam perencanaan program bantuan sosial melalui pola kelompok usaha bersama *idealnya* melalui beberapa

tahapan penelitian sosial sebagai studi kelayakan agar bantuan tersebut sesuai dengan sasaran, kebutuhan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait. Tahapan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan anggaran Dinas Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial sangat terbatas, disamping itu juga belum adanya kepastian lokasi program bantuan sosial pola KUBE di Kabupaten Sintang pada tahun berikutnya. Sehingga dalam mengajukan usulan calon lokasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui bantuan Sosial Pola KUBE berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Jumlah penduduk miskin masing-masing desa.
- Gambaran umum yang dapat mendukung program tersebut, seperti letak desa, sumber daya alam, karakteristik masyarakat setempat dan faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan program.
- Keberadaan Tenaga Pembangunan Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna sebagai sumber potensi sosial yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan program yang akan diusulkan.

Setelah diperoleh data yang mendukung kita membuat usulan Desa Sungai Pukat sebagai desa penerima bantuan sosial bagi keluarga miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama yang diajukan dalam bentuk proposal yang sangat sederhana. Sedangkan usulan bantuan yang kita ajukan adalah satu jenis usaha yaitu penggemukan sapi hal ini menurut kepala seksi BOBS dengan pertimbangan sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan usaha peternakan. Sedangkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat tidak kita buat dengan alasan belum

adanya kepastian program dan apabila kita ajukan dikhawatirkan memberikan harapan atau janji kepada Masyarakat ungkap Kasi BOBS. Setelah ada kepastian program tersebut maka selanjutnya kita mengadakan sosialisasi ke Kepala Desa dan menyiapkan data pendukung lainnya seperti jumlah data keluarga miskin.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Peneliti menindaklanjuti informasi tersebut dengan Kepala Desa Sungai Pukat untuk mendapat data yang valid tentang implementasi program tersebut. Setelah dilakukan wawancara, menurut Kepala Desa Sungai Pukat sebenarnya kami tidak tahu bahwa desa kami menerima bantuan sosial melalui pola KUBE karena merasa belum pernah mengajukan usulan. Hal ini baru diketahui setelah datang Petugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa desa kami akan menerima bantuan sosial dalam bentuk kelompok usaha bersama dengan jenis bantuan berupa usaha penggemukan sapi. Bantuan yang akan diterima berupa bibit anak sapi kata Kepala Desa sebagaimana yang disampaikan oleh Petugas dari Dinas Sosial.

Peneliti mengajukan pertanyaan berapa besar jumlah uang yang diberikan pada masing-masing kelompok ? apakah bantuan tersebut harus berupa barang atau paket usaha dan tidak berupa uang yang diserahkan langsung kepada Kelompok ? . Besarnya nilai bantuan uang untuk masing-masing kelompok adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dimana bantuan dapat diberikan dalam bentuk barang juga dapat berbentuk uang. Sedang pada kegiatan ini pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pertimbangan dari

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sepakat diberikan dalam bentuk barang (sapi) yang telah disepakati kelompok digunakan untuk pembelian bibit sapi, obat-obatan dan biaya pembuatan kandang. Hal ini mengantisipasi agar bantuan tersebut benar-benar sampai secara langsung kepada kelompok dan sesuai dengan program, demikian kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

Menurut Kepala Seksi BOBS pada Bidang Bantuan dan Jaminan sosial bahwa pengadaan sapi seluruh melalui Dinas Sosial Propinsi yang diserahkan kepada pihak Kedua melalui proses lelang untuk pengadaan seluruh Provinsi Kal-Bar. Sedangkan sapi yang didatangkan di Desa Sungai Pukat oleh pihak rekanan diserahkan kepada pihak ketiga untuk mengadakan. bantuan tersebut didatangkan dari Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, dengan jenis sapi lokal dan peranakan sapi Bali. Sedangkan bantuan lainnya yang diserahkan pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berupa uang untuk pembuatan kandang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut dikelola langsung oleh kelompok yang penggunaannya untuk biaya pembuatan kandang ternak dan biaya konsumsi lainnya, sedangkan obat-obatan untuk ternak didatangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

b. Proses Pembentukan KUBE

Dalam proses pembentukan KUBE di Kecamatan Kalam Permai sebagaimana dikemukakan oleh beberapa orang informan dijelaskan bahwa Kepala Desa menyiapkan data kepala keluarga miskin sebagaimana jumlah KUBE

sedangkan calon anggota KUBE atau yang disebut Keluarga Binaan Sosial sepenuhnya dipilih dan diseleksi oleh Kepala Desa bersama dengan perangkatnya, Petugas dari Dinas Sosial hanya memberikan kriterianya saja. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya Kepala Desa membagi menjadi 6 (enam) kelompok dengan jumlah 10 (sepuluh) orang perkelompok dimana di dalamnya terdapat susunan pengurusnya, ungkap Kepala Desa.

Struktur dan kepengurusan KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE. Namun demikian, pihak Departemen Sosial telah menawarkan struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota, kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok.

Dari hasil penelitian berapa anggota KUBE sebenarnya kalau diukur secara ekonomi terbilang masih cukup dibandingkan dengan warga lain yang masih kekurangan tidak masuk dalam anggota KUBE. Sehingga ada kecurigaan kepada pihak Desa bersifat tidak adil, Menurut Kepala Desa penentuan atau seleksi anggota KUBE yang kami lakukan tidak sepenuhnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pihak Dinas Sosial. Seleksi anggota lebih berdasarkan pertimbangan *pertama* pemerataan antara masyarakat lokal dengan warga transmigrasi *Kedua* warga yang kita pilih adalah betul warga yang mempunyai kemampuan dan paham tentang ternak, ungkap Kepala Desa Sungai Pukat.

Setelah dibentuk kelompok- kelompok tersebut, pihak aparat Desa membuat suatu kesepakatan yang harus diataati oleh seluruh anggota dan pengurus KUBE yaitu berkewajiban : mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati, mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab, membayar iuran dana kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan bersama yang sudah ditentukan, menghimpun dana untuk memperkuat modal usaha melalui lembaga keuangan mikro, serta memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

Berdasarkan keterangan diatas dan konfirmasi dari Kasi BOBS Dinas Sosial Kabupaten Sintang Kegiatan seleksi berdasarkan ketentuan harus dilakukan oleh Petugas dari Dinas Sosial, Aparat Desa Dan Pendamping. Akan tetapi kenyataan berbeda dilapangan, hal menurutnya dikarenakan tidak adanya jajaran Dinas sosial dilapangan yaitu Petugas Sosial Kecamatan yang bertugas untuk menyeleksi dan waktu proses seleksi anggota KUBE belum adanya penunjukan pendamping KUBE. Sehingga proses seleksi dilakukan oleh aparat Desa dengan pertimbangan sangat memahami kreteria masyarakat, menurut informan memang kenyataan dilapangan terjadi penyimpangan seleksi namun dapat kita maklumi.

c. Pemantapan Program KUBE

Setelah dilakukan pembentukan kelompok pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang melakukan kegiatan sosialisasi dengan calon keluarga binaan sosial (KBS)

sebagai anggota KUBE mengenai tujuan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola Kelompok Usaha Bersama. Pada kegiatan sosialisasi program dilakukan bersamaan dengan kegiatan Pemantapan, kegiatan pemantapan dan sosialisasi dilakukan dalam 2 (Dua) tahapan, 1 (satu) angkatan sebanyak 30 orang, kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) hari. Materi yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial pada kegiatan pemantapan adalah tentang tujuan, kewajiban dan tanggung jawab kelompok serta pembentukan pengurus, sedangkan materi atau pelatihan teknis tentang peternakan tidak dilakukan, anggota KUBE hanya diberikan buku petunjuk pemeliharaan ternak saja.

Sebagian besar (80% informan) anggota KUBE memberikan jawaban/informasi bahwa kegiatan pemantapan tersebut dirasakan waktunya sangat terbatas sekali dan kami merasa kurang memahami betul tujuan akhir dari bantuan dalam bentuk KUBE tersebut. Hampir 50 % anggota KUBE menyatakan kurang memahami dalam materi bimbingan teknis tentang kelompok, cara pemeliharaan ternak dan pembentukan embrio koperasi. Walaupun demikian menurut informan, kami merasa berterima kasih kepada Pemerintah khususnya kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada warga kami untuk menerima bantuan tersebut dan masyarakat sangat antusias mendukung kegiatan dimaksud.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantapan. Menurut salah satu staf Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan harusnya dilakukan selama 5 hari dengan melibatkan Dinas instansi

terkait, akan tetapi proses pemantapan tidak sesuai dengan ketentuan. Permasalahan-permasalahan tersebut mau tidak mau terpaksa kita lakukan uji kaji BOBS hal ini dikarenakan ketiadaan petugas di lapangan dan minimnya anggaran.

d. Peran Petugas Pendamping

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan seperti program KUBE tidak terlepas adanya kegiatan pendampingan, kegiatan pendampingan secara profesional diharapkan mampu mengangkat usaha ekonomi mikro menjadi lebih berdaya dan memiliki harapan-harapan yang jelas di masa-masa mendatang. Para pendamping adalah mereka yang ditunjuk oleh instansi / lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan KUBE Fakir Miskin dalam rangka upaya peningkatan pendapatan baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun anggota masyarakat yang memiliki kepedulian untuk berkiprah secara nyata dalam pembangunan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif KUBE Fakir Miskin.

Upaya untuk mencapai sasaran tersebut maka peran petugas pendamping sangat diperlukan demi keberhasilan dari tujuan kelompok usaha bersama dibentuk. Tugas pendamping KUBE mencakup: Memberikan pembinaan usaha kelompok, agar kelompok mampu membuat rencana kegiatan dalam KUBE sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata kelompok binaan sosial; Memberikan saran, pertimbangan dan bimbingan dalam memanfaatkan serta mendayagunakan bantuan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh KUBE; Memberikan saran,

pertimbangan dan jalan keluar bagi kelompok yang mengalami permasalahan dalam kelompok; Memberikan pendampingan dalam penyampaian laporan kegiatan KUBE.

Beberapa kriteria yang dijadikan pendamping KUBE yaitu minimal berpendidikan D-1 atau D-3, diutamakan S-1, atau yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat seperti PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Memiliki potensi kepribadian untuk memiliki prinsip berlaku jujur, adil, luwes, Amanah dan Memiliki sensitivitas dan loyalitas pada pengangkatan harkat dan martabat KUBE Fakir Miskin serta mampu membuat laporan hasil pendampingan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Peran dan fungsi pendamping adalah sebagai Motivator yaitu memotivasi dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha anggota KUBE dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemandirian ekonomi. Sebagai Fasilitator yaitu memfasilitasi kelompok usaha dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sebagai Katalisator yaitu menjembatani dan mendorong hubungan antara Individu dengan anggota KUBE fakir miskin dan dengan warga masyarakat yang lain serta pihak birokrasi.

Berdasarkan penelitian bahwa peran pendamping sebagaimana tersebut diatas tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, keterbatasan pemahaman akan program KUBE oleh petugas pendamping menjadi kendala utama. Hal ini dikarenakan rekrutmen pendamping tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dari temuan dilapangan Pendamping dari aparat Desa berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak pernah menjadi TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) penunjukan pendamping dari pihak Kecamatan dan aparat Desa lebih mempertimbangkan untuk kemudahan koordinasi ditingkat bawah. Disamping itu

juga bahwa tenaga pendamping tidak pernah mendapat pembekalan terlebih dahulu tentang program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE. Berdasarkan keterangan yang disampaikan informan, para pendamping dalam melaksanakan tugasnya hanya dibekali buku petunjuk tentang program KUBE, akibatnya pendamping tidak dapat memahami secara menyeluruh tentang program tersebut. Dengan keterbatasan pemahaman peran pendamping selaku pembina KUBE dilapangan belum dapat memberikan pengaruh terhadap kemajuan KUBE.

Kegiatan pendamping berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala Desa dan anggota KUBE, hanya memfasilitasi rapat-rapat kelompok apa bila ada kendala dalam kelompok dan memberikan laporan perkembangan KUBE ke Dinas Sosial Kabupaten Sintang. Sedangkan untuk peran pendamping dalam memberikan bimbingan dalam memanfaatkan serta menyalurkan bantuan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh KUBE belum mampu dilakukan seorang pendamping KUBE.

Usaha untuk mengatasi hal tersebut, pendamping memberikan laporan secara berjenjang dari pendamping di tingkat Desa ke Pendamping di Tingkat Kecamatan selanjutnya menyampaikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Berdasarkan laporan tersebut pihak Kabupaten akan menindaklanjuti apabila ada suatu permasalahan di dalam kelompok dengan melakukan rapat kelompok, ujar responden selaku Kasi BOBS. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dikemukakan bahwa kegiatan pembinaan kelompok baik dilakukan petugas pendamping maupun dari Dinas Sosial Provinsi atau Kabupaten Sintang sejak digulirkannya program tersebut hanya dilakukan kurang lebih 6 (enam) kali

sebagaimana yang tercatat dalam agenda kerja Kepala Desa. Sejak bulan Januari 1998 anggota KUBE di Desa Sungai Pukat tidak pernah lagi mendapat pembinaan khususnya oleh pendamping KUBE, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pendamping KUBE dari Kecamatan bahwa honorarium pendamping dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang diberikan selama 9 (Sembilan) bulan dan telah habis pada akhir bulan Desember 2007 dengan demikian juga habis tanggung jawab dan tugas mereka sebagai pendamping.

2. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelayan Permai

Indikator-indikator keberhasilan KUBE, sebagai berikut: (1) KUBE dapat melaksanakan peran dan fungsi usaha ekonomis produktif dan usaha kesejahteraan sosial dengan baik, (2) Keluarga Binaan Sosial dengan KUBE-nya memiliki kemandirian, (3) KUBE dapat melaksanakan skim kredit, serta (4) Tumbuhnya embrio koperasi dan kemitraan usaha. Melalui indikator sebagaimana telah diuraikan oleh Dirjen Bantuan Sosial Fakir Miskin, Departemen Sosial di atas, apakah telah sesuai implementasi program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Tolok ukur atau penentuan anggota KUBE dapat dikatakan lancar atau berkembang apabila memenuhi persyaratan :

- a. Secara umum tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan sosial yang ditandai dengan: Meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan) dan kesehatan serta pendidikan anak-anak secara lebih layak, meningkatnya dinamika sosial, baik dalam KUBE maupun dengan

masyarakat sekitarnya, meningkatnya kemampuan dan keterampilan dalam pemecahan masalah.

- b. Secara khusus berkembangnya KUBE, ditandai dengan : Berkembangnya kerjasama diantara sesama anggota KUBE dan antara KUBE dengan masyarakat , meningkatnya usaha KUBE, meningkatnya pendapatan KUBE serta tumbuh kembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk pengumpulan Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS).

KUBE yang telah berdiri / terbentuk dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori , yaitu :

1. Tahap embrio, dengan indikator calon KBS belum melaksanakan kegiatan usaha tetapi secara individu sudah / belum mempunyai usaha (waktu pembentukan 3 sampai dengan 6 bulan).
2. Tahap tumbuh, dengan indikator sudah mendapatkan bantuan modal stimulan, sudah ada anggota (kurang lebih 10 orang). sudah ada kepengurusan, sudah ada usaha bersama. ada aturan tertulis mengenai organisasi KUBE dan sudah ada peraturan mengenai proses usaha ekonomis produktif (jangka waktu 1 tahun dan perkembangan anggota 20%).
3. Tahap berkembang, dengan indikator modal yang dimiliki sudah meningkat sebesar minimal 30%, mampu menyusun dan melaksanakan Rencana Anggaran Belanja Usaha dan mampu mengumpulkan iuran kesejahteraan sosial (IKS) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan anggota. minimal satu bulan sekali, dengan jangka waktu selama 1 tahun dengan perkembangan anggota minimal 50%.

4. Tahap maju, dengan indikator modal yang dimiliki sudah berkembang 50%, mulai merencanakan dan/atau mempersiapkan pengkuliran dana kepada calon anggota KUBE yang lain, mampu menjalankan semua aturan dengan baik dan mampu meningkatkan iuran kesejahteraan sosial (IKS) sebesar 50% dalam jangka waktu 1 tahun dan perkembangan anggota 80%.
5. Tahap mandiri, indikatornya pemilikan modal telah mencapai 75%, sudah ada pengkuliran dana kepada calon anggota KUBE sebanyak minimal 3 orang, sudah ada rencana untuk berbadan hukum dan menarik IKS minimal 100% sudah mampu mengakses pasar. jangka waktu untuk menjadi mandiri selama tiga tahun dengan perkembangan anggota sebesar 100%.

Kegiatan pengembangan kelompok merupakan salah ciri untuk mengetahui sejauh mana kelompok usaha bersama yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut ke arah kemandirian, baik dalam kegiatan luaran kesejahteraan sosial dan pengembangan usaha. Seperti tumbuhnya embrio koperasi melalui usaha simpan pinjam, kemajuan perkembangan peternakan dengan meningkatnya usaha pengemukan sapi. Usaha pengemukan sapi yang dilakukan anggota KUBE adalah dengan harapan anggota KUBE dapat merawatnya dengan harapan ternak tersebut dapat :

- Ternak menjadi sehat dan dewasa kemudian di jual sebagian keuntungan di jadikan modal simpan pinjam atau mengembangkan usaha dibidang lain sesuai dengan kesepakatan. Kemudian sebagian lagi keuntungan dibelikan bibit sapi dengan jumlah sapi lebih dari yang dijual kemudian dipelihara secara bersama atau bergantian.
- Atau dapat juga dengan cara pemeliharaan sampai dewasa dan berkembang biak (digaduh) secara bergantian kepada masing-masing anggota kelompok.
- Pola pengembang usaha berdasarkan kesepakatan kelompok dan mendapat persetujuan dari Pendamping.

Berdasarkan pola pengembangan tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para anggota kelompok yang kebetulan ada ditempat, menurut mereka pola yang ditawarkan oleh Dinas Sosial memang sangat bagus. Akan tetapi menurutnya bibit sapi yang diberikan kebanyakan jenis bibit sapi lokal dan usia sebagian besar masih terlalu kecil $\pm 5 - 8$ bulanan, cocoknya bibit sapi adalah sapi bali dan usia minimal 12 bulan - 18 bulan dengan harapan nilai jual akan lebih tinggi dan proses pengembangan KUBE akan lebih cepat tercapai. Akibatnya sebagian anggota merasa sungkan untuk mendapat pemeliharaan tahap pertama karena bibitnya kurang sehat dan takut mati kedua bibit tersebut akan menyita waktu terlalu lama untuk menjadikan sapi yang sehat yang layak jual.

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang dilakukan peneliti pada bulan April tahun 2009 terlihat ada sebagian besar sapi yang dipelihara oleh peserta KUBE tinggal 4 (empat) ekor saja, hal ini disebabkan hanya sebagian kelompok saja yang masih tetap mempertahankan usaha penggemukan sapi, dengan harapan dapat mengambil hasil keuntungan lain dari ternak sapi tersebut yaitu kotorannya untuk usaha pertanian dan tetap sepat pada ketentuan kelompok untuk berusaha melakukan usaha pengemukan sapi dan pola gaduh.

Hasil informasi dari pendamping dan Kepala Desa, diketahui sejak tahun 2007 - 2009, pengembangan usaha KUBE di bidang ternak sapi di Desa Sungai Pukat mengalami kesulitan dan lama berkembang. Hal ini disebabkan pada waktu pemantapan yang dilakukan pada peserta KUBE sangat terbatas dan tidak pernah dilakukan penyuluhan dan pembinaan dari instansi teknis seperti Dinas intansi yang

membidangi Peternakan dan Koperasi. Oleh karena itu sebenarnya pernah diajukan usulan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang akan tetapi pihak Kabupaten kurang menanggapinya karena dengan alasan tidak masuk anggaran mereka. Pernyataan Kepala Desa tersebut di atas juga dibenarkan oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, menurutnya kebijakan teknis program KUBE berada di Propinsi dan kita sudah mengajukan sampai sekarang belum mendapat jawaban pasti.

Akan tetapi menurut pendamping pada aspek-aspek tertentu anggota KUBE mampu pengalihan pola pengembangan KUBE dari pola pemeliharaan gaduh dialihkan ke pola pengemukan dan kegiatan simpan pinjam. Hal ini dikarenakan adanya pengalaman dari anggota kelompok yang berasal dari transmigrasi Jawa memberikan pengalaman kepada kelompok lain sehingga aset anggota KUBE tetap terjaga. Berdasarkan hasil laporan dari Kepala Desa Sungai Pukat jumlah keseluruhan dana anggota KUBE dari hasil penjualan ternak yang dikembangkan pada kegiatan simpan pinjam dari modal awal berjumlah Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 35.062.000 (Tiga Puluh Lima Juta enam Puluh Ribu Rupiah) data sebagaimana tabel 4.1

Menurut informan yang ditemui, sangat mengharapkan bahwa pemberian jenis bantuan usaha agar ada perbedaan antara kelompok sesuai dengan kemampuan dan harapan masyarakat serta kondisi daerah, karena bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah tentu kami tidak bisa menolak. Papar Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya. Kalau dilihat potensi dan keadaan alam di Desa Sungai Pukat bantuan ternak sapi memang cocok akan tetapi kurangnya bimbingan teknis tentang

peternakan sehingga anggota kelompok yang berasal dari masyarakat lokal banyak yang tidak berhasil karena kurang pemahaman cara berternak. Sedangkan bagi anggota KUBE yang berasal dari suku Jawa sebagian besar cukup berhasil akan tetapi belum dapat mengembangkan usahanya, dari 10 Informan (anggota KUBE) yang diwawancarai memberikan sebanyak 8 orang memberikan jawaban karena kurangnya pendampingan, bibit sapi terlalu kecil dan kurang pembinaan dari instansi terkait. Sedangkan 2 orang memberikan jawaban karena kurangnya keseriusan anggota yang mengaduh (memelihara).

Untuk mengetahui kesesuaian dan keberhasilan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE yang sebagaimana yang telah dilaksanakan di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai pada tahun 2007. Peneliti mengkonfirmasi data tersebut kepada Kepala Dinas Sosial dan Kasi BOBS sebagaimana sesuai dengan buku pedoman KUBE dan usaha pengembangan UEP (usaha ekonomis produktif) KUBE. Menurut Kepala Seksi BOBS indikator keberhasilan program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola KUBE di Desa Sungai Pukat sampai dengan bulan Mei 2009 belum menunjukkan suatu keberhasilan yang diharapkan sebagaimana sesuai indikator yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial.

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Pendamping dari Kecamatan yang juga menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan di Kantor Camat Kelay Permai karena dari jumlah sapi yang diberikan sebanyak 24 ekor sampai saat ini tersisa 3 ekor di tambah pembelian induk sapi Bali 1 ekor jadi keseluruhan berjumlah 4 ekor sapi, sedangkan jumlah ternak yang mati sebanyak 12 ekor dan dijual sebanyak 8 ekor.

Sebagian besar ternak yang mati antara 1 s/d 4 bulan sejak ternak disalurkan, berdasarkan jawaban informan untuk mengantisipasi kerugian pengurus KUBE menjual ternak tersebut untuk dialihkan pada kegiatan simpan pinjam dan membelikan bibit sapi yang dewasa, walaupun dirasakan rugi oleh para anggota KUBE. Laporan perkembangan usaha penggemukan sapi terlihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA PENGGEMUKAN SAPI

No	Nama KUBE	Jenis Usaha	Jmlh Ternak	Gaduh/sisa	Mati	Dijual	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sejahtera Satu	Pengemukan	4	1	2	1	Dijual utk Simpan Pinjam
2.	Sejahtera Dua	Sda	4	1	1	2	Dijual utk Simpan Pinjam
3.	Sejahteraa Tiga	Sda	4	1	1	2	Dibelian sapi bali 1 ekor Dijual utk Simpan Pinjam
4.	Lebi	Sda	4	1	2	1	Dijual utk Simpan Pinjam
5.	Teratai Indah Satu	Sda	4	-	2	2	-
6.	Teratai Indah Dua	sda	4	-	4	-	-
			24	4	12	8	

Sumber : Data Pendamping Kecamatan. Tahun 2009

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa tujuan utama dari kegiatan pengemukan sapi adalah pengemukan dan penukaran (penjualan) untuk dibelikan bibit sapi dengan jumlah lebih dari yang dijual. Akan tetapi tujuan tersebut belum dapat tercapai karena banyaknya ternak yang mati. Banyak ternak sapi yang mati pada umumnya disebabkan bibit terlalu kecil (usia menyusui), kurang sehat, di samping itu

juga kurangnya pemahaman dalam perawatan. Menurut salah satu ketua kelompok Bukit Barisan, banyaknya ternak yang mati di kelompok kami juga disebabkan ketidakpahaman dalam pemberian atau penggunaan obat seperti obat vitamin dan obat cacing. Hal ini katanya disebabkan tidak adanya pembinaan dan penyuluhan dari instansi terkait sehingga kami tidak mengetahui cara perawatan yang benar. Namun demikian ada beberapa kelompok yang berusaha menukar jenis ternak yang lain seperti babi dan ada juga yang menjual untuk mendapatkan jenis ternak yang unggul.

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan dan keberhasilan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Sosial Pola KUBE di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai tahun 2007. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Dinas bahwa kegiatan monitoring yang pada dasarnya juga merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Untuk kegiatan monitoring pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang melakukan monitoring melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa, petugas pendamping dan laporan Ketua KUBE. Akan tetapi kegiatan monitoring melalui laporan tidak dapat berjalan secara kontinyu oleh sebab itu, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang terkendala dalam memberikan laporan ke Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk monitoring secara langsung di lapangan juga pernah dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Sosial Kabupaten Sintang sebanyak 2 (Dua) Kali yaitu pada awal tahun 2008. Namun dari tahun 2008 sampai dengan sekarang (tahun 2009) Kegiatan monitoring tersebut tidak pernah dilakukan lagi, alasan keterbatasan

anggaran dan tidak adanya jajaran di tingkat bawah menjadi alasan yang selalu diungkapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang .

Apa yang dikemukakan oleh informan di atas juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Beliau juga tidak menampik bahwa ketidak uletan dan kurangnya wawasan dibidang pembangunan kesejahteraan sosial pada jajarannya menjadi suatu kendala sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk mengetahui efektifitas dan efesiensi suatu program tersebut belum dapat kita ukur dan kita evaluasi sampai saat ini kita hanya mengira-ngira berdasarkan laporan.

Menurut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pelimpahan anggaran ke Kabupaten dalam bentuk dana perbantuan seringkali terbentur oleh kebijakan dari Direktur Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial RI. Menurut sumber dari pejabat di Departemen Sosial RI dana perbantuan akan mudah direalisasikan jika institusi Dinas Sosial di Kabupaten atau Kota berdiri sendiri tanpa bergabung dengan intitusi Departemen lain, demikian kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. Namun demikian kita akan berusaha meningkatkan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial dengan harapan dapat memberikan dukungan program melalui dana APBD Kabupaten Sintang.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa sungai pukat bahwa Program bantuan sosial berupa ternak sapi tidak begitu berhasil sebagaimana yang diharapkan akan tetapi dampak lain dari program tersebut memberikan suatu pembelajaran yang baru dari masyarakat. Pembelajaran tersebut misalnya anggota

KUBE mampu membentuk embrio koperasi melalui kegiatan simpan pinjam dan arisan kelompok, mengembangkan usaha penguliran ke usaha pengemukan. Disamping itu juga ada dampak positifnya ada pembauran antara penduduk lokal dengan warga pendatang.

B. Pembahasan

Berdasarkan temuan di atas bahwa Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang tahun 2007 belum dapat terlaksana sebagaimana acuan dalam pedoman Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui KUBE. Implementasi kebijakan tidak berorientasi pada tujuan kebijakan yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat akan tetapi lebih cenderung pada penyelesaian kegiatan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa tahapan-tahapan kegiatan tidak dilakukan sebagaimana acuan dalam buku pedoman KUBE. Mulai dari proses usulan dimana tidak melalui suatu penelitian sosial tentang tentang karakter masyarakat dan kebutuhan masyarakat sehingga bantuan tersebut untuk sebagian anggota bukan menjadi suatu kebutuhan yang dapat meningkatkan kesejahtraannya akan tetapi malahan menjadi beban yang menyita waktu bekerja bagi masyarakat desa.

Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dalam arti tingkat pendidikan yang rata-rata tidak tamat sekolah dasar dan kurangnya pemahaman dalam peternakan khususnya anggota KUBE yang berasal dari penduduk lokal ditambah kurangnya pembinaan menyebabkan usaha ekonomis produktif KUBE tidak berhasil. Pembentukan struktur organisasi KUBE yang dibentuk oleh Dinas Sosial tidak dapat

berjalan sebagaimana perannya hal dikarenakan pemahaman anggota tentang struktur organisasi sangat terbatas, khususnya pada pembukuan administrasi KUBE. Sedangkan keberhasilan KUBE dalam kegiatan simpan pinjam dikarenakan pengalaman dari beberapa anggota KUBE yang berasal dari warga transmigrasi.

Pendekatan kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui bantuan sosial Pola KUBE di Desa Sungai Pukat lebih menggunakan Pendekatan *top-down* yaitu bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat pada level bawahnya. Hal ini tercermin dari hasil penelitian bahwa bantuan usaha pengemukan sapi sebanyak 4 (empat) ekor sapi, tidak sesuai dengan jumlah anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang dan tidak seimbang dengan jumlah dana yang dialokasikan sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) penentuan jenis dan pengadaan bantuan berdasarkan pertimbangan sepihak oleh aparat pelaksana pada pihak Dinas Sosial dan bukan dari keinginan anggota KUBE., inti pendekatan *top-down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Pendekatan *top-down* tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam program KUBE yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *colletive action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ada beberapa tahap administrasi khususnya pada proses usulan, sosialisasi, seleksi, pematapan dan penetapan serta pembekalan untuk seorang pendamping KUBE tidak sesuai sebagaimana pedoman program KUBE. Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidak patuhan pelaksana kebijakan atas ketentuan yang digariskan seperti kegiatan seleksi dilakukan oleh kepala desa tanpa melalui ketentuan yang disyaratkan. Kegiatan pematapan dilakukan dengan waktu yang singkat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan ketentuan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE hendaknya juga harus didampingi dengan anggaran dari Daerah (kebijakan pembangunan sosial pemerintah daerah) sebagai operasional dilapangan. akan tetapi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak dapat menyediakan anggaran pendamping dikarenakan keterbatasan anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Ketidak mampuan menyediakan anggaran pendamping program KUBE juga dikarenakan belum adanya kepastian program yang akan di luncurkan hal menunjukan lemah koordinasi antara pihak Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Akibatnya beberapa tahap kegiatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya .

Proses sosialisasi dan pematapan sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagaimana oleh anggota kelompok dilakukan sangat singkat yaitu 2 (Dua) hari dari ketentuan yaitu 5 (lima) hari tanpa adanya tujuan akhir dari pembentukan KUBE. Sehingga masyarakat menganggap bantuan tersebut adalah bantuan cuma-cuma tanpa adanya tanggung jawab yang mengikat dan tidak memberikan pembelajaran kemandirian sebagaimana arti kata pemberdayaan itu sendiri. Sedangkan keterlibatan

Dinas Instansi luar yang seperti Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dilibatkan walaupun mempunyai kaitan dengan tujuan KUBE tersebut.

Kurang pembinaan serta pengawasan mengakibatkan bantuan tersebut menjadi "hit and Run" akibatnya banyak KUBE yang tidak berjalan lagi sesuai dengan tujuan yang terkandung tujuan KUBE dibentuk. Ada beberapa aspek tertentu boleh dikatakan sudah memberikan dampak positif seperti adanya pembelajaran bagi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, melakukan IKS (Iuran Kesejahteraan Sosial) dan pembentukan arisan serta kegiatan simpan pinjam sebagai bentuk embrio koperasi.

Tabel 4.2. PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.
LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN ARISAN KELOMPOK

No	Nama KUBE	Modal Awal	April 2009	Jumlah anggota KUBE	Jumlah anggota Arisan
(1)	(2)	(3)			
1.	Sejahtera Satu	Rp. 1.000.000	Rp. 3.000.000	10	13
2.	Sejahtera Dua	Rp. 3.000.000	Rp. 13.000.000	10	15
3.	Sejahtera Tiga	Rp.3.000.000	Rp. 15.750.000	10	25
4.	Lebi	Rp.1.500.000	Rp. 3.312.000	10	10
		Rp. 8.500.000	Rp. 35.062.000	40	12

Sumber : Data Kepala Desa Kecamatan. Tahun 2009

Peran pendamping hanya sebagai suatu pelengkap saja dalam suatu program, hal ini karena pendamping yang ditunjuk tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagai pendamping. Berdasarkan petunjuk teknis Program KUBE FM bahwa hendaknya

pendamping harus mempunyai tingkat pendidikan minimal D2 atau setara dan harus terlebih dahulu mengikuti kegiatan pementapan kelompok yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi kenyataannya pendamping sebagaimana yang ada tidak pernah diberikan pembekalan tentang program KUBE hanya diberikan buku petunjuk tentang tujuan dan tanggung jawab pendamping KUBE dan belatar belakang SMA dan SD.

Segala kebijakan teknis lebih terfokus di tingkat Dinas Sosial Provinsi karena yang bertanggung jawab dalam program tersebut dimana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan kebijakan Dinas Sosial Provinsi. Hal ini menyebabkan saling lempar tanggung jawab dimana secara hirarki antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak mempunyai hubungan kedinasan yang mengikat antara bawahan dan atasan.

Kurangnya tanggung jawab dalam melaksanakan program secara maksimal, menurut pihak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat bahwa kita menindak lanjuti usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten dimana pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten. Oleh pihak Kabupaten tidak dapat berbuat banyak karena segala kebijakan teknis berada di tingkat Propinsi dan kurangnya keterbukaan dengan pihak Kabupaten. Masalah tersebut juga disebabkan kurang koordinasi dan konsultasi baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan disamping itu pihak Dinas Propinsi tidak membuat petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Kondisi seperti yang dikemukakan di atas menyebabkan dalam pelaksanaan melanggar ketentuan yang ditetapkan tanpa ada

tahapan-tahapan yang terencana sebagaimana yang termuat dalam pedoman teknis pengembangan KUBE.

Di samping itu ketiadaan jajaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang dulunya disebut Petugas Sosial Kecamatan membuat perencanaan dan pembinaan dilapangan tidak dapat berjalan sebagaimana ketentuan dalam pedoman KUBE. Selain itu juga kurangnya pemahaman tentang tentang program pembangunan kesejahteraan sosial pada jajaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang saat ini bukan bertatar belakang pegawai sosial (eks Departemen Sosial Kabupaten Sintang).

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ilmiah aspek kebijakan publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kabupaten Sintang. Proses implementasi kebijakan program mulai dari proses perencanaan, pengusulan, seleksi, pemantapan, sosialisasi dan penunjukan pendamping kelompok tidak melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan dalam pedoman KUBE. Sehingga tujuan terbentuknya KUBE tidak dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan permasalahan tersebut tidak dapat terimplementasi sesuai dengan rencana yang ditentukan dikarenakan oleh beberapa hal :

1. Pelaksana kebijakan program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE hanya berorientasi pada tujuan penyelesaian pada proyek dan bukan berorientasi pada implikasi dan efek dari kebijakan sosial tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) menyangkut kualitas hidup dan pemberian pelayanan kolektif.
2. Implementasi Kebijakan Program KUBE hanya dilaksanakan oleh Dinas Sosial tanpa melibatkan Dinas instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Peternakan Perikanan setempat dan Dinas Perindag, Koprasi dan UKM walaupun ada keterkaitan antara tujuan KUBE dengan lembaga instansi terkait diatas. Disamping itu juga pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat cenderung tertutup pada hal-hal yang bersifat teknis kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang. senada dengan pendapat Spicker (dalam Suharto, 2005:16) dan Hogwod dan Gun (dalam Wahab, 2000:89)

Kendala tersebut juga disebabkan oleh beberapa persyaratan implementasi kebijakan diperhatikan, hal senada yang diungkapkan Ashari (2003:45), persyaratan agar implementasi kebijakan dapat efektif yaitu:

3. Kemampuan organisasi pelaksana : dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak didukung dengan kemampuan untuk melaksanakan implementasi kebijakan program tersebut. Misalnya keterbatasan anggaran dana pendamping program yang berasal dari APBD Kabupaten Sintang, tidak adanya jajaran Dinas Sosial di tingkat kecamatan yang bertugas menyusun usulan perencanaan dari bawah dan melakukan pembinaan dilapangan.
4. Isi pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan (*need*) dari masyarakat dan utilitas fasilitasi pelayanan publik: misalnya jenis bantuan usaha ekonomis produktif yang diberikan bukan keinginan dari seluruh anggota KUBE, bantuan ternak yang diberikan terlalu kecil, jumlah ternak yang diberikan dan tidak sesuai dengan jumlah anggota KUBE, keinginan anggota KUBE agar adanya pembinaan rutin baik dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Instansi terkait tidak dapat diberikan oleh pelaksana program.

Implentasi kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE menghadapi berbagai kendala dikarenakan tidak memperhatikan aspek-aspek implementasikan kebijakan, yaitu :

5. Hakikat proses administrasi kebijakan tidak dilakukan sebagaimana pedoman KUBE seperti mulai dari proses pengusulan program tidak direncanakan dari awal, koordinasi dan konsultasi antara Dinas Sosial Kabupaten dengan Dinas Sosial Provinsi sangat kurang serta tidak adanya petunjuk teknis dari Dinas Sosial Provinsi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
6. Tidak patuhnya atas suatu kebijakan dan pelaksanaan program (kebijakan tidak sesuai rencana), misalnya waktu pemantapan KUBE dilakukan sangat singkat tidak sesuai dengan ketentuan, proses seleksi dan sosialisasi awal tidak dilakukan oleh Dinas Sosial akan tetapi diserahkan kepada aparat Desa, petugas pendamping tidak diberikan pembekalan/pemantapan tentang program KUBE akan tetapi hanya diberikan buku pedoman KUBE, monitoring dan evaluasi tidak dilakukan berkala dan berjenjang sehingga pihak Dinas Sosial tidak mengetahui Efek atau dampak dari hasil implementasi kebijakan program tersebut;
7. Efek atau dampak dari isi implementasi (kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki), *pada aspek ekonomi* belum memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggota KUBE dikarenakan bantuan sapi dari segi kualitas (kecil/lokal) dan kuantitas (jumlah ternak tidak sebanding dengan jumlah anggota KUBE) akibatnya bantuan tersebut menyita waktu dalam proses pengemukan dan penguliran. (Anderson, Islamy:2000:76)

Selain kendala-kendala tersebut diatas juga disebabkan faktor-faktor lainnya

seperti :

8. *Kondisi internal* yaitu aparat pelaksana tidak memahami tujuan yang terkandung dalam Program KUBE hal ini dikarenakan personil pelaksana bukan berlatar belakang pekerja sosial (bukan eks Pegawai Departemen Sosial).
9. *Kondisi eksternal tidak menguntungkan* seperti adanya anggapan yang keliru dari masyarakat bahwa bantuan sosial (Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) tidak ada tanggung jawab untuk dikembalikan atau gulirkan.
10. Jenis bantuan usaha ekonomis produktif berupa ternak sapi yang diadakan oleh pihak ketiga merupakan kebijakan Dinas Sosial, keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan sepihak tanpa dikoordinasikan dengan anggota kelompok. Pendekatan kebijakan tersebut menggunakan model pendekatan top-down, model pendekatan top-down tidak sejalan era demokrasi dan reformasi sekarang ini dengan semangat *civil society*. Anggota KUBE hanya sebagai subjek dari sasaran proyek, hal ini tidak sejalan dengan pendapat dari Guy Gran dan David Korten (dalam Yuwono, 2001:50-52)

Dari hasil penelitian pada aspek capaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE di Desa Sungai Pukat bahwa dari 6 (enam) tujuan yang terkandung dalam KUBE ada 2 (dua) tujuan program tersebut telah menunjukkan kemajuan diantaranya :

1. Meningkatkan prinsip-prinsip gotong royong dalam melaksanakan pembangunan serta mengumpulkan dana masyarakat melalui iuran kesetiakawanan sosial (IKS). Capaian program diantaranya tumbuhnya nilai-nilai keserasian sosial dalam anggota KUBE salah satunya adanya pembauran antara anggota KUBE dari masyarakat lokal dengan warga transmigrasi.
2. Meningkatkan prinsip berkoperasi dalam meningkatkan usaha ekonomis produktif kelompok, capaian program diantaranya adanya kegiatan IKS sebagai modal kegiatan simpan pinjam kelompok, kegiatan ini merupakan embrio koperasi sebagai pembelajaran untuk penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

2. Saran

1. Dalam penyusunan perencanaan program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial pola KUBE hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang perlu melakukan penelitian sosial dengan harapan bantuan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada implikasi dan efek yaitu meningkatkan kesejahteraan (*welfare*).
2. Untuk menyusun rencana program yang bersumber dari dana dekonsetrasi hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meningkatkan konsultasi dan koordinasi baik dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat maupun Departemen Sosial RI. Dengan harapan adanya pelimpahan dari dana dekonsetrasi ke dana perbantuan disamping itu juga tersusun perencanaan yang baik dengan didukung anggaran yang memadai baik dari dana APBN maupun dari dana APBD sebagai dana pendamping.
3. Supaya program dapat berjalan sebagaimana pedoman yang ditentukan hendaknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat membuat petunjuk teknis agar agar memudahkan pelaksana dilapangan dalam implementasi kebijakan.
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang seharusnya menempatkan lagi Petugas Sosial Kecamatan sebagai aparat terdepan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu juga perlu peningkatan pengetahuan atau wawasan program baik pada jajaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai pelaksana maupun bagi petugas pendamping sebelum program tersebut diimplementasikan.

5. Sehubungan dengan cukup besarnya dana simpan pinjam kelompok hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melakukan pengembangan dengan menyediakan bantuan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar berdirinya badan koperasi di Desa Sungai Pukat.
6. Agar program tersebut dapat diterima dan adanya tanggung jawab anggota Kelompok bersama untuk mengembangkan bantuan tersebut hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan aparat Kecamatan, aparat Desa dan tokoh masyarakat setempat.
7. Dan untuk menghindari prasangka yang negatif dari anggota KUBE terhadap bentuk bantuan berupa barang (ternak) yang disampaikan bukan berupa uang oleh Departemen Sosial kepada mereka, maka perlu dilakukan sosialisasi diperjelas alasan dan pertimbangan pemberian bantuan tersebut secara transparan.
8. Pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang maupun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat hendaknya meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung agar dapat mengetahui kesesuaian program yang telah diimplementasikan dan target yang akan dicapai sebagaimana dalam pedoman Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang di terbitkan Departemen Sosial RI.
9. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan pendekatan yang bersifat society oleh karena Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

hendaknya dalam pelaksanaan kebijakan sosial menggunakan *model kebijakan indikatif* (menurut Conyers, dalam Suharto, 2004: 69) yakni seluruh kebijakan mengupayakan pada kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat sedangkan Pemerintah hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besarnya sedangkan masyarakat melaksanakan sepenuhnya.

10. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan pendekatan bersifat *society* oleh karena itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam mengimplementasi kebijakan program menggunakan model *bottom-up* yaitu kebijakan yang berasal dari bawah (masyarakat) sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agus JP, Sri WK dan Wilfridus. (2007). *ADPU 434 Teori organisasi*. Jakarta : UT.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*. Jakarta : Bina Aksara.
- Anshari, ET. (2003). *Upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik di era persaingan bebas*. Jakarta : Forum Inovasi Universitas Indonesia.
- Bapeda dan BPS Kabupaten Sintang. (2008). *Kabupaten Sintang dalam angka 2007*. Kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Departemen Sosial RI. (2004). *Petunjuk pengembangan usaha keluarga binaan sosial dalam KUBE*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Departemen Sosial RI. (2005). *Rencana strategis penanggulangan kemiskinan tahun 2006-2010*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Departemen Sosial RI (2007). *Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Dipohusodo. (1996). *Evaluasi proyek konstruksi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press.
- Giarsi, GG. (2001). Caught in Nets: A Critical Examination of the use of the concept of Network in Community Development, Studies. *Community development Journal*, Vol 36 (1): 63 – 67, Januari 2001. USA, Oxford University Press.
- Handoko, TH. (2000). *Manajemen*. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.
- Isbandi, R.A. (2002). *Pemikiran-pemikiran pembangunan kesejahteraan sosial*. Jakarta : FE.UI.
- Islamy, Irfan.,M. (2000). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara..
- Jones, C. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta : Rajawali Pers
- Krismartini. dkk. (2008). MAPU 5301, *Analisis kebijakan publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Martodirdjo, H. (1991). *Orang tugutil di halmahera struktur dan dinamika sosial penghuni hutan*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Moleong, L.J. (1993). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1983). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1981. *tentang Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Putra, F. (2005). *Kebijakan tidak untuk publik*. Yogyakarta : Resist Book.
- Prasetya, I. (2006). MAPU 5103, *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Prijono, Onny S, dan Pranarka, A.M.W, (1996). *Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implmentasi*. Jakarta : CSIS.
- Santoso, A. (1993). *Analisis kebijaksanaan publik. suatu pengantar*, Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.
- SMERU. (2004). *Memahami suara orang miskin*. Jurnal volume 11 Juli-September 2004. Jakarta : SMERU
- Subejo dan Supriyanto, (2004:14). Harmonisasi pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pembangunan berkelanjutan, *Buletin ekstensia*. Jakarta : Pusat Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian RI . Vol 19 Tahun XI/2004.
- Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial dilengkapi contoh-contoh naskah kebijakan (policy paper)*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sumardi, M dan Evers. (1982). *Kemiskinan dan kebutuhan pokok*. Jakarta : Rajawali Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang *Pokok-pokok pembangunan bidang kesejahteraan sosial*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia
- Warsito dan Teguh, Y. (2003). *Otonomi daerah: Capacity building dan penguatan demokrasi lokal*. Semarang : Puskodak Undip.
- Wahab, S. (2000). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, S dan Pramusinta, A. (2004). *Evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta : Universitas Gadjahmada.

- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen otonomi daerah: Membangun daerah berdasar paradigma baru*. Semarang : CLOGAPPS, Diponegoro University, Semarang.

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

Suatu Studi di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai
Kabupaten Sintang Tahun 2007

Identitas Informan: (Mantan Kadis Sosial dan PM, Kadis Sosial Nakertrans, Kabid Kesos, Kasi BOBS dan Camat Kelay Permai)

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Pertanyaan Kepada Informan :

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE fakir miskin yang diselenggarakan di Kecamatan Kelay Permai tahun 2007?
- 2) Apa tujuan dari Program KUBE ?
- 3) Dari mana sumber dana program pemberdayaan keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE ?
- 4) Apa persyaratan bagi masyarakat untuk menjadi anggota KUBE?
- 5) Bagaimana proses sosialisasi dan seleksi dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan kelay permai?
- 6) Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat?
- 7) Bagaimana proses pemberian bantuan kepada anggota KUBE ?

- 8) Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota KUBE?
- 9) Siapa saja atau instansi apa saja yang terlibat dalam program KUBE?
- 10) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembentukan KUBE?
- 11) Dalam perencanaan program bantuan sosial melalui KUBE, apakah tahapan tersebut dapat berjalan sesuai dengan Pedoman KUBE ?
- 12) Pertimbangan apa saja sehingga suatu desa/daerah mendapat program KUBE?
- 13) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat ?
- 14) Berapa besaran nilai nominal yang diberikan kepada masing-masing kelompok ?
- 15) Bagaimana peran Kepala Desa dalam proses pembentukan KUBE?
- 16) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE?
- 17) Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusan KUBE yang ada di Kecamatan Kelam Permai?
- 18) Dalam upaya pemantapan kegiatan KUBE, kegiatan apa saja yang dilakukan agar KUBE dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah?
- 19) Siapa yang saja yang memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pemantapan program KUBE?
- 20) Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program KUBE?
- 21) Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program KUBE?
- 22) Lembaga/instansi apa saja yang terlibat dalam program KUBE?
- 23) Bagaimana dengan peran Petugas pendamping?
- 24) Apa tujuan adanya pendampingan dalam program KUBE?
- 25) Darimana petugas pendamping diambil dalam program KUBE?
- 26) Seberapa efektif petugas pendampingan bagi keberhasilan program KUBE?
- 27) Apa saja tugas yang diemban oleh petugas pendampingan?
- 28) Usaha apa saja yang dilakukan oleh KUBE di desa Sungai Pukat?

29) Bagaimana realisasi hasil dari adanya program penggemukan sapi ?

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai

30) Sebutkan apa yang menjadi Indikator-indikator keberhasilan KUBE?

31) Setelah dua tahun program tersebut apakah telah menunjukan kemajuan ?

32) Pada tahap keberapa KUBE yang ada di Kecamatan Kelam Permai khususnya di Desa Sungai Pukat?

33) Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program KUBE di Kecamatan Kelam Permai?

34) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

UNIVERSITAS TERBUKA

**TRANSKIP WAWANCARA HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUBE)**

Suatu studi di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai
Kabupaten Sintang Tahun 2007

Pertanyaan Kepada Informan (Dinas Sosial, Kasi, Camat)

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE fakir miskin yang diselenggarakan di Kecamatan Kelam Permai tahun 2007?

Jawab (Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)

“ Mekanisme bantuan untuk penanggulangan kemiskinan diperkuat dengan dukungan dana melalui fasilitas pemerintah daerah yang sebelumnya melalui proses perencanaan dan usulan di tingkat bawah meliputi proses : Pendataan keluarga miskin, Pendataan SDA dan SDM serta kebutuhan masyarakat setempat; Memberikan rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten setempat untuk diteliti sebagai kelayakan program,

Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat kita lakukan semua dengan alasan, terbatas anggaran pendukung pada Dinas sosial, tidak Pekerja Sosial Kecamatan, belum adanya kepastian program dan apabila kita ajukan dikhawatirkan memberikan harapan atau janji kepada masyarakat ungkap Kasi BOBS. Setelah ada kepastian program tersebut maka selanjutnya kita mengadakan sosialisasi ke Kepala Desa dan menyiapkan data pendukung lainnya seperti jumlah data keluarga miskin.

- 2) Apa tujuan dari Program KUBE ?

Jawab (Responden Kadis Sosial)

“ Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin, meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam menanggulangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan, serta meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

- 3) Dari mana sumber dana program Pemberdayaan Keluarga miskin melalui bantuan sosial pola KUBE ?

Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)

- “ Keseluruhan dana program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE fakir miskin bersumber dari dana dekonsentrasi melalui Dinas Sosial Propinsi Kal-Bar”
- 4) Apa persyaratan bagi masyarakat untuk menjadi anggota KUBE?
- Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)**
- “ Untuk menjadi anggota KUBE berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan bagi fakir miskin, syarat-syarat untuk menjadi anggota KUBE adalah: Berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Susenas / BPS, Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, dan tidak ada ketrampilan tambahan. Persyaratan tersebut kita sesuaikan dengan kondisi maka untuk penentuan diserahkan dengan aparat desa.”
- 5) Bagaimana proses sosialisasi dan seleksi dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan kelam permai?
- Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)**
- “ Kegiatan sosialisasi : dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Propinsi dan Kecamatan kepada aparat Desa dan tokoh masyarakat. Untuk seleksi idealnya dilakukan oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten, Aparat Desa dan Petugas Pendamping. Dikarenakan keterbatasan anggaran Dinas Sosial Kabupaten kegiatan seleksi dilakukan oleh aparat desa yang telah dibekali petunjuk sebagaimana ketentuan.”
- 6) Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat?
- Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kasi BOBS)**
- “ Sejak otonomi daerah volume koordinasi/konsultasi makin berkurang, karena tidak ada hubungan secara hirarki kedinasan, kegiatan konsultasi dilakukan apabila ada luncuran dari pusat ke Kabupaten. Sehingga terjadi rencana program pembangunan Kesejahteraan Sosial antara Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten kurang berkesinambungan”
- 7) Bagaimana proses pemberian bantuan kepada anggota KUBE ?
- Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)**
- “ Setelah ditentukan lokasi dan diberikan pemantapan, bantuan ternak dan obat-obatan disalurkan ke anggota KUBE dimana pembagiannya diatur oleh pendamping dan Kepala Desa. Bantuan tersebut diadakan oleh pihak ketiga yang dikoordinir langsung oleh Dinas Sosial Propinsi, pihak Dinas Sosial Kabupaten hanya memfasilitasi dan melakukan pembinaan dilapangan. Sedang bantuan uang untuk kegiatan gotong royong pembuatan kandang ternak diberikan berupa uang sebesar Rp.1,5 Juta rupiah oleh pihak Dinas Sosial Propinsi. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada anggota KUBE”
- 8) Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota KUBE?

Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial dan Camat Kelam)

- ” Kegiatan pembinaan dilakukan oleh pihak pendamping dari Desa dan Kecamatan sedangkan pelatihan UEP dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan memberikan buku-buku petunjuk pengembangan KUBE pada saat pemantapan kelompok”

9) Siapa saja atau instansi apa saja yang terlibat dalam program KUBE?

Jawab .(Responden :Mantan Kadis Sosial, Kabid Kesejahteraan Sosial dan Kasi BOBS)

- ” Dikarenakan keterbatasan anggaran maka kita tidak melibatkan Dinas instansi terkait, hal ini merupakan kelemahan dari Dinas Sosial karena tidak menyediakan dana pendamping ”

10) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembentukan KUBE?

Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial dan Kasi BOBS)

- ” dalam pembentukan KUBE tidak kendala karena kita menyesuaikan dengan keinginan masyarakat dan saran pertimbangan Kepala Desa, awalaupun ada keinginan masyarakat untuk memisahkan memisahkan antara anggota KUBE yang berasal dari waga transmigrasi dan masyarakat lokal ”

11) Dalam perencanaan program bantuan sosial melalui KUBE, apakah tahapan tersebut dapat berjalan sesuai dengan Pedoman KUBE ?

Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kabid Kesejahteraan Sosial)

- ” Karena kurangnya koordinasi antara Kabupaten dan Propinsi, keterbatasan anggaran pembangunan kesejahteraan serta ketiadaan jajaran sosial di tingkat Kecamatan mengakibatkan perencanaan tidak melalui tahapan seperti melakukan penelitian sosial, penjajakan lokasi dan kegiatan sosialisasi serta pembinaan sehingga sehingga terkesan bantuan tersebut Cuma-Cuma ”

12) Pertimbangan apa saja sehingga suatu desa/daerah mendapat program KUBE?

Jawab .(Responden Mantan Kadis Sosial)

- ” Jumlah keluarga miskin cukup besar, kondisi wilayah dan kondisi sosial masyarakat yang sangat cocok dengan program KUBE pengemukan sapi”

13) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi ?

Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial)

- ” Oleh pihak Dinas Sosial Propinsi, untuk UEP bantuan diberikan dalam bentuk barang yaitu bibit sapi, hal ini mengantisipasi agar bantuan tersebut benar-benar sampai secara langsung kepada kelompok dan sesuai dengan program, sedangkan biaya pembuatankandang ternak diberikan dalam bentuk uang”

14) Berapa besaran nilai nominal yang diberikan kepada masing-masing kelompok ?

- Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial)**
 ” Jika diuangkan menurut pihak propinsi masing-masing kelompok dengan nominal Rp. 20.000.000,-
- 15) Bagaimana peran Kepala Desa dalam proses pembentukan KUBE?
- Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial dan camat)**
 “ Peran Kepala desa sebagai pembina dan fasilitator antara anggota Kube dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang maupun pihak Dinas Sosial Pronsi Kal-bar “
- 16) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE?
- Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial)**
 ” Jumlah kelompok sebanyak 6 KUBE untuk satu KUBE terdiri 10 orang ”
- 17) Bagaimana struktur organisasi dan kepengurusan KUBE yang ada di Kecamatan Kelam Permai?
- Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial)**
 ” Untuk struktur pengurusan KUBE disesuaikan dengan keinginan anggota, walaupun kita menawarkan struktur KUBE sebagaimana pedoman”
- 18) Dalam upaya pemantapan kegiatan KUBE, kegiatan apa saja yang dilakukan agar KUBE dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah?
- Jawab .(Responden Kadis Sosial)**
 “ Hendaknya pemantapan dilakukan selama 5 hari dengan melibatkan Dinas Instansi terkait sesuai dengan UEP KUBE dalam pemantapan anggota KUBE diberikan bimbingan tentang tujuan program, syarat,kewajiban pembentukan pengurus KUBE, bimbingan berkoperasi, kegiatan IKS serta latihan pengembangan usaha”
- 19) Siapa yang saja yang memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pemantapan program KUBE?
- Jawab .(Responden Mantan Kadis Sosial dan Kasi BOBS)**
 ” Dinas Sosial Kabupaten Sintang , Dinas Sosial Propinsi Kal-bar dan aparat kecamatan”
- 20) Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program KUBE?
- Jawab .(Responden Mantan Kadis Sosial dan Kasi BOBS)**
 “ Materi pemantapan berupa penyampaian tentang pembentukan pengurus KUBE, tujuan KUBE, kewajiban anggota KUBE dan bimbingan usaha ekonomis produktif.Tujuan pemantapan menurut Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial adalah untuk mensosialisasikan tujuan program KUBE”.
- 21) Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program KUBE?
- Jawab .(Responden Mantan Kadis Sosial dan Kasi BOBS)**
 “ Hendaknya pemantapan dilakukan selama 5 hari , Akan tetapi karena ketidak tersediaan dana penguatan dari APBD daerah kegiatan pemantapan tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan , kegiatan

dilakukan selama 2 hari terbagi dua kegiatan pementapan dalam satu angkatan dikuti 30 orang “

22) Lembaga/instansi apa saja yang terlibat dalam program KUBE?

Jawab .(Responden Mantan Kadis Sosial)

“ Dinas Sosial Propinsi Kal-Bar, Dinas Sosial Kab. Sintang dan Aparat Kecamatan”

23) Bagaimana dengan peran Petugas pendamping?

Jawab .(Responden Kasi BOBS)

“ Tugas pendamping KUBE mencakup: Memberikan pembinaan usaha kelompok, agar kelompok mampu membuat rencana kegiatan dalam KUBE sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata kelompok; Memberikan saran, pertimbangan dan bimbingan dalam memanfaatkan serta mendayagunakan bantuan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh KUBE; Memberikan saran, pertimbangan dan jalan keluar bagi kelompok yang mengalami permasalahan; Memberikan laporan kegiatan KUBE”

24) Apa tujuan adanya pendampingan dalam program KUBE?

Jawab .(Responden Kasi BOBS)

“ Motivator dan fasilitator dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha KUBE dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, kemandirian ekonomi binaan sosial, kerjasama kelompok “

25) Darimana petugas pendamping diambil dalam program KUBE?

Jawab .(Responden Camat)

“ dari Unsur Kecamatan dan aparat desa hal ini untuk memudahkan kecamatan dan melakukan pengawasan dan pembinaan”

26) Seberapa efektif petugas pendampingan bagi keberhasilan program KUBE?

Jawab .(Responden Camat)

“ Peran pendamping KUBE pada program ini dirasakan perannya masih kurang sebagaimana yang diharapkan hal ini dapat kita pahami karena tidak diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh pihak Dinas Sosial propinsi, hanya diberikan buku pedoman KUBE dan bimbingan praktis. Sehingga mereka kurang mahami program KUBE”

27) Apa saja tugas yang diemban oleh petugas pendampingan?

Jawab .(Responden Kabid Kesejahteraan Sosial)

“ Disamping melakukan pembinaan, pendamping wajib memberikan laporan perkembangan UEP kelompok, akan tetapi pada akhir tahun 2007, pendamping tidak menyampaikan laporan lagi karena masa kerja/ honorarium telah selesai”

“ Berdasarkan laporan tersebut pihak Kabupaten akan menindaklanjuti apabila ada suatu permasalahan di dalam kelompok dengan melakukan rapat kelompok”

28) Usaha apa saja yang dilakukan oleh KUBE di desa Sungai Pukat?

Jawab .(Responden Kasubdin Kesos dan Kasi BOBS)

“ Usaha pengemukan sapi, usulan bantuan yang kita ajukan adalah satu jenis usaha yaitu penggemukan sapi hal ini dengan pertimbangan sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan usaha peternakan”

29) Bagaimana realisasi hasil dari adanya program penggemukan sapi ?

Jawab .(Responden Kadis Sosial, Kasubdin Kesos dan Kasi BOBS)

” Realisasi program memang tidak kita capai sepenuhnya sebagaimana tahapan-tahapan yang tentukan seperti perencanaan, koordinasi di tingkat kecamatan/Desa, sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan dilapangan karena kebijakan teknis berada di propinsi. Ternak yang diberikan pihak ke tiga terlalu kecil, tidak sesuai dengan jumlah anggota KUBE dan bukan jenis bibit sapi unggul. Akibatnya banyak ternak yang mati karena terbatasnya pemahaman dalam perawatan, proses perguliran memakan waktu yang lama.akibatnya bantuan tersebut terkesan cuma-cuma ”

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai

30) Sebutkan apa yang menjadi Indikator-Indikator keberhasilan KUBE?

Jawab .(Responden Kasubdin Kesos dan Kasi BOBS)

“ Indikator-indikator keberhasilan KUBE. Dilihat dari : (1) KUBE dapat melaksanakan peran dan fungsi UEP dan UKS dengan baik, (2) KUBE dengan KUBE-nya memiliki kemandirian, (3) KUBE dapat melaksanakan skim kredit, serta (4) Tumbuhnya embrio Koperasi dan kemitraan usaha ”

31) Setelah dua tahun Program tersebut apakah telah menunjukan kemajuan ?

Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kasi BOBS)

” Sampai saat ini Dinas Sosial terkendala untuk mengukur kemajuan program hal ini disebabkan sejak pertengahan tahun 2008 tidak ada laporan perkembangan KUBE yang disampaikan oleh pendamping, disamping itu juga kurangnya pembinaan lanjutan baik dari Dinas Sosial Propinsi Kal-bar maupun dari Dinas Sosial Kabupaten sehingga perkembangan KUBE belum menunjukan kemajuan berarti sesuai indikator yang dikeluarkan oleh DEPSOS”

“ Tujuan dari kegiatan pengemukan sapi adalah pengemukan dan penukaran (penjualan) untuk dibelikan bibit sapi dengan jumlah lebih dari yang dijual. Akan tetapi tujuan tersebut belum dapat tercapai karena banyaknya ternak yang mati. Banyak ternak sapi yang mati pada umumnya disebabkan bibit terlalu kecil (usia menyusui), kurang sehat, di samping itu juga

kurangnya pemahaman dalam perawatan. Untuk menyelamatkan aset ada beberapa KUBE mengalihkan pada kegiatan simpan pinjam kelompok ”

32) Pada tahap keberapa KUBE yang ada di Kecamatan Kelam Permai khususnya di Desa Sungai Pukat?

Jawab .(Responden Kadis Sosial dan Kasi BOBS)

- “ Ada beberapa aspek tertentu boleh dikatakan sudah memberikan dampak positif seperti adanya pembelajaran bagi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, melakukan IKS (Iuran Kesejahteraan Sosial) dan pembentukan arisan serta kegiatan simpan pinjam sebagai bentuk embrio Koperasi. Berdasarkan hasil monitoring dilapangan sebagian besar KUBE termasuk dalam kategori tahap berkembang walaupun sebagian besar kegiatan KUBE beralih pada kegiatan simpan pinjam”

33) Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi program KUBE di Kecamatan Kelam Permai?

Jawab .(Responden Kadis Sosial)

- “ Pertama : kurang koordinasi dan konsultasi baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Kedua : Terbatasnya anggaran Pembangunan bidang Kesos pada Dinas Sosial Kabupaten. Ketiga : Ketiadaan jajaran Dinas Sosial di tingkat Kecamatan. Keempat : kurangnya pemahaman tentang program pembangunan Kesejahteraan Sosial pada jajaran Dinas Sosial yang saat ini bukan berlatar belakang pegawai sosial. Kelima : Segala kebijakan teknis masih ditentukan pihak propinsi selaku pelaksana dana dekonsentrasi.”

34) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

Jawab .(Responden Kadis Sosial)

- “ Dimasa kedepan kita akan meningkatkan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Propinsi dalam menyusun perencanaan kedepan, menguatkan anggaran penanggulangan kemiskinan dari APBD dan meningkatkan SDM baik bagi pegawai Dinas Sosial maupun kepada pilar-pilar tenaga kesejahteraan sosial di masyarakat. ”
- “ Kita akan melakukan pendekatan ke Depsos RI agar program penanggulangan kemiskinan dilimpahkan ke daerah melalui dana perbantuan sehingga kita bisa melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan KUBE.”

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Suatu Studi di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kalam Permai
Kabupaten Sintang Tahun 2007

Identitas Informan : (Kepala Desa dan Pendamping KUBE)

1. Nama :
2. Umur :
3. Jems Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Pertanyaan Kepada Informan

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Se jauh mana keterlibatan Desa dalam proses awal program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE fakir miskin yang diselenggarakan khususnya di Desa Pukat yang bapak ketahui ?
 - 2) Bagaimana proses yang ditempuh untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota KUBE?
 - 3) Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara pihak Desa dengan pihak Kecamatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang ?
 - 4) Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota KUBE ?
 - 5) Siapa yang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota KUBE ?
 - 6) Apakah diusulan kegiatan UEP dari anggota KUBE atau telah ditentukan oleh Dinas Sosial ?
 - 7) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembentukan KUBE ?
 - 8) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat ?
- Jawab .(Responden Pendamping)**

- 9) Berapa besaran nilai nominal yang diberikan kepada masing-masing kelompok ?
- 10) Bagaimana peran kepala desa dalam proses pembentukan KUBE ?
- 11) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE ?
- 12) Dalam upaya pemantapan kegiatan KUBE, kegiatan apa saja yang dilakukan agar KUBE dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah ?
- 13) Sejauhmana peran petugas pendamping ?
- 14) Apa tujuan adanya pendampingan dalam program KUBE ?
- 15) Darimana petugas pendamping diambil dalam program KUBE?
- 16) Apa saja tugas yang diemban oleh petugas pendampingan ?
- 17) Bagaimana bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh pendamping ?

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai

- 18) Setelah dua tahun program tersebut berjalan apakah telah menunjukan kemajuan ?
- 19) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

**TRANSKIP WAWANCARA HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA**

Identitas Informan : Kepala Desa dan Pendamping

Pertanyaan Kepada Informan

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Sejauh mana keterlibatan Desa dalam proses awal program penanggulangan kemiskinan melalui KUBE yang diselenggarakan khususnya di Desa Pukat yang bapak ketahui ?

Jawab .(Responden Kades)

- ” Sebenarnya kami tidak tahu bahwa Desa kami menerima bantuan sosial melalui pola KUBE karena merasa belum pernah mengajukan usulan. Hal ini baru diketahui setelah datang petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa desa kami akan menerima bantuan sosial dalam bentuk kelompok dengan jenis bantuan usaha penggemukan sapi. Bantuan yang akan diterima berupa bibit anak sapi sebagaimana yang disampaikan oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang dan pihak Kecamatan” .

- 2) Bagaimana proses yang ditempuh untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota KUBE?

Jawab .(Responden Kades)

- “ Anggota KUBE sepenuhnya dipilih dan diseleksi oleh aparat desa, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Sintang hanya memberikan kriterianya saja”

- 3) Bagaimana proses koordinasi/konsultasi antara pihak Desa dengan pihak Kecamatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ?

Jawab .(Responden Kades)

- ” Dalam pelaksanaan program tersebut pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang maupun pihak Kecamatan selalu berkoordinasi dengan pihak Desa dalam melaksanakan kegiatan maupun apa bila ada kendala-kendala yang perlu tangani”

- 4) Bagaimana bentuk pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada anggota KUBE ?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

- “ Bentuk pembinaan diberikan pada waktu pemantapan saja yaitu tentang tujuan KUBE dan pembentukan kelompok, sedangkan pelatihan tidak pernah diberikan “

- 5) Siapa yang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota KUBE ?

Jawab .(Responden Kades)

- “ Pembina hanya dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang dan pendamping sedangkan untuk pelatihan UEP tidak ada diberikan “

- 6) Apakah diusulan kegiatan UEP dari anggota KUBE atau telah ditentukan oleh Dinas Sosial?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

- " Jenis UEP KUBE ditentukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan pertimbangan sesuai dengan kondisi desa dan terbatasnya waktu dalam pelaksanaan program "

- 7) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembentukan KUBE ?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

- " Banyaknya keinginan masyarakat untuk membentuk kelompok sendiri, sedangkan kita menginginkan pembauran kelompok antara masyarakat lokal dengan waraga transmigrasi, dengan harapan dapat memberikan pengalaman "

- 8) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat ?

Jawab .(Responden Pendamping)

- " Bantuan berupa temak sapi sebanyak 24 ekor dan masing KUBE menerima 4 ekor , bibit sapi jenis peranakan sapi bali, akan tetapi sapi tersebut masih terlalu kecil dan tidak sesuai dengan nominal bantuan. Selain sapi masing-masing kelompok diberi bantuan obat-obatan dan uang pembuatan kandang sebesar Rp. 1.500.000,- "

- 9) Berapa besaran nilai nominal yang diberikan kepada masing-masing kelompok ?

Jawab .(Responden Kades)

- " Nilai bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- "

- 10) Bagaimana peran kepala desa dalam proses pembentukan KUBE ?

Jawab .(Responden Kades)

- " Kepala desa beserta aparatnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu menyeleksi anggota KUBE "

- 11) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE ?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

- " Jumlah KUBE sebanyak 6 kelompok dengan anggota perkube sebanyak 10 orang "

- 12) Dalam upaya pemantapan kegiatan KUBE, kegiatan apa saja yang dilakukan agar KUBE dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah ?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

- " Hendaknya penentuan jenis usaha KUBE berdasarkan usulan dari masyarakat dan bukan atas usulan dari kabupaten akan tetapi dikarenakan pertimbangan lainnya kami memakluminya "

- 13) Sejauhmana peran petugas pendamping ?

Jawab .(Responden Pendamping)

- " Saya selaku pendamping saya merasakan kurang dapat berbuat secara maksimal dalam mendayagunakan bantuan yang dilaksanakan oleh KUBE hal dikarenakan kami tidak

bekali pemantapan sebagai pendamping hanya diberikan buku petunjuk, sehingga kami kurang mengerti akan tujuan KUBE ”

14) Apa tujuan adanya pendampingan dalam program KUBE ?

Jawab .(Responden Pendamping)

” Peran pendamping membenarkan saran, pertimbangan dan bimbingan dalam memanfaatkan serta mendayagunakan bantuan yang dilaksanakan oleh KUBE; memberikan saran, pertimbangan dan jalan keluar bagi kelompok yang mengalami permasalahan dalam kelompok; memberikan pendampingan dalam penyampaian laporan kegiatan KUBE”

15) Darimana petugas pendamping diambil dalam program KUBE?

Jawab .(Responden Kades)

“ Pendamping ada dua orang dari personil kecamatan dan salah satu staf desa”

16) Apa saja tugas yang diemban oleh petugas pendampingan ?

Jawab .(Responden Pendamping)

“ Tugas kami memberikan pertimbangan dan jalan keluar bagi kelompok yang mengalami permasalahan dalam kelompok, memberikan laporan perkembangan kube Dinas Sosial ”

17) Bagaimana bentuk pelaporan yang dilaksanakan oleh pendamping ?

Jawab .(Responden Pendamping)

“ Bentuk laporan tidak ada yang baku, kami memberikan laporan hanya tentang jumlah ternak KUBE dan kegiatan simpan pinjam “

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai

18) Setelah dua tahun program tersebut berjalan apakah telah menunjukan kemajuan ?

Jawab .(Responden Kades dan Pendamping)

“ Untuk mengukur kemajuan sebagaimana petunjuk dari DEPSOS memang tidak tercapai, seperti banyaknya ternak yang mati karena bibit terlalu kecil, kurang memahami cara berternak dan kurangnya pembinaan teknis dari instansi terkait. Akan tetapi disisi lain ada 4 KUBE mengalihkan usaha dalam bentuk usaha simpan Pinjam”

19) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

Jawab .(Responden Pendamping dan Kadesa)

“ Kiranya bantuan tersebut harus sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan mulai awal sampai dengan kegiatan berjalan, masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan yang berkaitan dengan usahanya. Bantuan harus sesuai dengan nominal yang diberikan dan dilakukan pembinaan berkelanjutan”

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Suatu Studi di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelay Permai
Kabupaten Sintang Tahun 2007

Identitas Informan : (Anggota KUBE)

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :
6. Alamat :

Pertanyaan Kepada Informan

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Bagaimana mekanisme yang saudara ketahui dalam pelaksanaan program KUBE Fakir Miskin yang diselenggarakan di Desa Pukat Kecamatan Kelay Permai Tahun 2007?
- 2) Bagaimana menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota KUBE ?
- 3) Bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE di Desa Pukat Kecamatan Kelay Permai?
- 4) Siapa yang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota KUBE ?
- 5) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat ?
- 6) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE ?
- 7) Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program KUBE ?
- 8) Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program KUBE?
- 9) Berapa jumlah KUBE di Desa Pukat dan apa nama KUBE ?

- 10) Usaha apa saja yang dilakukan oleh KUBE di Desa Sungai Pukat ?
- 11) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan pengemukan sapi ?

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai

- 1) Setelah dua tahun program tersebut berjalan apakah usaha pengemukan sapi telah menunjukkan kemajuan ?
- 2) Apakah KUBE telah melakukan usaha pengembangan usaha di bidang lain ?
- 3) Jika ada, apa jenis pengembangan usaha ekonomis lainnya ?
- 4) Apa alasan mengalihkan atau mengembangkan usaha ekonomis lainnya ?
- 5) Apakah anggota KUBE telah melakukan iuran kesejahteraan sosial ?
- 6) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

UNIVERSITAS TERBUKA

**TRANSKIP WAWANCARA HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
MELALUI BANTUAN SOSIAL POLA KELOMPOK USAHA BERSAMA**

Pertanyaan Kepada Informan (Anggota KUBE / sample 10 orang)

A. Proses Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

- 1) Bagaimana mekanisme yang saudara ketahui dalam pelaksanaan program KUBE Fakir Miskin yang diselenggarakan di Desa Pukat Kecamatan Kelay Permai Tahun 2007?

Jawab .(80 % memberikan jawaban Responden memberikan jawaban)

“ Awalnya kami diundang kepala desa tentang penyampaian adanya program KUBE dengan beberapa syarat dan kewajiban bagi yang bersedia, selanjutnya kami mengisi formulir untuk bersedia mentaati ketentuan bila menjadi anggota KUBE, selanjut kami diberi pembekalan selama dua hari”

Jawab .(20 % memberikan jawaban Responden memberikan jawaban)

“ Kami di suruh mengisi formulir/blanko calon KUBE tentang syarat menjadi anggota KUBE, anggota KUBE di utamakan bagi warga kurang mampu akan tetapi ada sebagian juga warga kurang mampu tapi tidak masuk anggota KUBE karena jumlahnya terbatas “

- 2) Bagaimana menentukan siapa yang berhak untuk menjadi anggota KUBE?

Jawab .(100 % Responden memberikan jawaban yang sama)

” yang menentukan yang berhak menjadi anggota KUBE adalah Kepala desa”

- 3) Bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam pelaksanaan program KUBE di Desa Pukat Kecamatan Kelay Permai?

Jawab .(100 % Responden memberikan jawaban)

“ Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada saat kegiatan pemantapan”

- 4) Siapa yang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota KUBE ?

Jawab .(100 % Responden memberikan jawaban)

“ Yang memberikan pembinaan pada waktu pemantapan yaitu Dinas Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan pihak Kecamatan, untuk pelatihan keterampilan tidak ada “

- 5) Apa bentuk bantuan UEP (uang atau barang) yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat ?

Jawab .(100 % Responden memberikan jawaban)

” Bantuan yang kami terima berupa ternak sapi sebanyak 4 ekor, obat-obatan ternak dan bantuan uang pembuatan kandang sebanyak Rp.1.500.000,-”

6) Berapa banyak jumlah anggota untuk satu KUBE ?

Jawab .(100 % Responden memberikan jawaban)

" Sepuluh Orang "

7) Materi apa saja yang diberikan dalam kegiatan pemantapan program KUBE ?

Jawab .(70 % Responden memberikan jawaban)

" Materi yang diberikan tentang tujuan KUBE, kewajiban anggota, cara pengembangan KUBE dan pembentukan pengurus KUBE "

Jawab : (30 % Responden memberikan jawaban)

" tentang tujuan KUBE, syarat dan Kejiban menjadi anggota KUBE serta Peningkatan Usaha masyarakat "

8) Berapa lama waktu untuk kegiatan pemantapan program KUBE?

Jawab .(65 % Responden memberikan jawaban)

" Kegiatan pemantapan waktu sangat singkat yaitu 2 hari, bagi menjadi 2 kegiatan dengan satu pemantapan diikuti sebanyak 30 orang, akibatnya kami rasakan kurang memahami dan kami tidak diberikan keterampilan teknis tentang tatacara pemeliharaan ternak yang baik"

Jawab .(35 % Responden memberikan jawaban)

" Kegiatan Pemantapan waktunya sangat singkat ± 1 hari untuk satu angkatan, kegiatannya dilaksanakan di balai desa Sungai Pukat."

9) Berapa jumlah KUBE di Desa Pukat dan apa nama KUBE ?

Jawab : (100 % Responden memberikan jawaban)

" 10 KUBE "

10) Usaha apa saja yang dilakukan oleh KUBE di Desa Sungai Pukat ?

Jawab : (50 % Responden memberikan jawaban)

" Awalnya usaha pengemukan sapi,karena banyaknya ternak yang mati karena terlalu kecil usia 5-8 bulan kami mengalihkan pada kegiatan simpan pinjam"

Jawab : (50 % Responden memberikan jawaban)

" Usaha pengemukan sapi, yaitu sapi digemukan kemudian di tukar/dijual dibelikan bibit lagi dan juga bisa dengan cara gaduh "

11) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan pengemukan sapi ?

Jawab : (50 % Responden memberikan jawaban)

" Hampir semua responden memberikan jawaban " ternak terlalu kecil dan bukan bibit unggul tetapi peranakan sapi bali, ± setelah 3 bulan disalurkan ada beberapa ternak sudah ada yang mati. Disamping itu juga proses pengemukan terlalu lama, menyita waktu dan lama menunggu penguliran / pengaduhan ternak.

Jawab : (50 % Responden memberikan jawaban)

” Sebagian anggota KUBE kurang memahami cara perawatan ternak dikarenakan tidak ada pembinaan dari instansi terkait seperti dinas peternakan”

B. Pencapaian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kalam Permai

12) Setelah dua tahun program tersebut berjalan apakah usaha pengemukan sapi telah menunjukan kemajuan ?

Jawab : (80 % Responden memberikan jawaban)

“ Usaha pengemukan kurang berhasil, karena bibit kurang sehat akan tetapi ada juga yang berhasil tetapi cukup menyita waktu, maka kami mengalihkan pada kegiatan simpan pinjam dalam bentuk kegiatan arisan “

Jawab .(Responden anggota KUBE Sejahtera Dua yaitu Bapak Wowok dan Pak Sis)

“ bahwa sapi yang diberikan pada kelompoknya sejumlah 4 ekor dengan usia antara \pm 5 s/d 8 bulanan meliputi 3 (tiga) ekor sapi lokal dan 1 (satu) ekor lagi sapi peranakan jenis sapi bali. Seiring berjalannya waktu, 1 (Satu) ekor sapi pada kelompok kami ada yang mati karena sakit, sedangkan 2 ekor lainnya telah kami jual untuk usaha simpan pinjam dan 1 (Satu) ekornya lagi kami gaduhkan kepada anggota kelompok”

“ data sebagaimana tertulis pada Tabel.4.1 dan Tabel . 4.2 “

13) Apakah KUBE telah melakukan usaha pengembangan usaha di bidang lain ?

Jawab : (80 % Responden memberikan jawaban)

” Untuk menjaga aset anggota KUBE jangan sampai habis, maka berdasarkan kesepakatan bersama dan atas persetujuan pendamping dan Kades beberapa ternak kami jual dan uangnya kami gunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Dan ada juga anggota KUBE mengalihkan pada ternak babi dan kambing akan tetapi tidak berhasil”

Jawab : (20 % Responden memberikan jawaban)

” Untuk KUBE Teratai Indah Satu dan Teratai Indah Dua kegiatan KUBE sudah dibilang tidak berjalan karena ternak mati semua dan ada juga di jual dialihkan pada kegiatan ternak Bibi dan kambing akan tetapi mati semua “

14) Jika ada, apa jenis pengembangan usaha ekonomis lainnya ?

Jawab : (100 % Responden memberikan jawaban)

” Kegiatan simpan pinjam, ternak babi dan kambing”

15) Apa alasan mengalihkan atau mengembangkankan usaha ekonomis lainnya ?

Jawab : (90 % Responden memberikan jawaban)

” Untuk menjaga aset anggota KUBE jangan sampai habis”

Jawab : (10 % Responden memberikan jawaban)

” Kami kurang berpengalaman dalam berternak sapi”

16) Apakah anggota KUBE telah melakukan iuran kesejahteraan sosial ?

Jawab : (80 % Responden memberikan jawaban)

” kegiatan iuran kesejahteraan sosial yang masih berjalan hanya 4 KUBE setiap anggota memberikan simpanan sebesar Rp.7.000,- perminggunya, uang tersebut untuk kegiatan arisan, perawatan ternak dan simpan pinjam. Dengan adanya penjualan beberapa ternak maka dana kas simpan pinjam cukup lumayan. (Tabel. 4.1)

Jawab : (20 % Responden memberikan jawaban)

“ Kegiatan IKS pada KUBE Teratai Indah Satu dan Teratai Indah Dua tidak dapat berjalan lama karena kehidupan anggota kurang berkecukupan, anggota tidak taat dalam melakukan iuran dan mengembalikan pinjaman ”

17) Bagaimana harapan ke depan agar program KUBE lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya semakin oleh oleh anggota KUBE?

Jawab : (hampir rata – rata 60 % Responden memberikan jawaban)

” Bantuan harus sesuai dengan keinginan masyarakat, yang terpenting harus adanya pembinaan dari dinas instansi terkait dan jika bantuan ternak jumlah harus sesuai dengan jumlah anggota kelompok dan bibit harus sehat dan unggul. ”

Jawab : (40 % Responden memberikan jawaban)

“ Jenis bantuan harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan pengadaan hendaknya dilakukan oleh kelompok, pembinaan harus melibatkan dinas instansi terkait lainnya

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN. III

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK KUBE DESA SUNGAI PUKAT
KECAMATAN KELAM PERMAI TAHUN 2007**

NO	JABATAN DALAM KUBE	NAMA ANGGOTA KUBE					
		SEJAHTERA I	SEJAHTERA II	SEJAHTERA III	LEBI	TERATAI INDAH. I	TERATAI INDAH. II
1	KETUA	LINEN	WOWOK	SUKAR	SURATMIN	LIMAN	SULAIMAN
2	SEKRETARIS	PARMIN	DADANG	SANGAU	AMIN	PETRUS	RANKING
3	BENDAHARA	JATMOKO	UUN	IPAU	UJUN	GARAY	MARIA
4	ANGGOTA	ANTON	KASIN	TARSIN	NELY	JULIANUS	LUKAS
5	ANGGOTA	SINAI	TURAN	RIPANG	JUNUT	PETRUS	SIDEM
6	ANGGOTA	JARWO	SENIN	ANDON	SUPARDI	OJOK	MATSYAH
7	ANGGOTA	MARKUS	SIDAN	KIRANG	RAHMAN	MAIMUN	JOHAN
8	ANGGOTA	AYENG	MAMAN	MAMAT	JAMIAT	ITANG	JAKING
9	ANGGOTA	TONO	TIYANG	RENIN	PINARSO	RUDI	KRIS
10	ANGGOTA	KARSEM	UJANG	JONI	ULIN	KARNA	MELANDANG

Sumber data : Kepala Desa Sungai Pukat .

BIO DATA


Nama : MARBUANSYAH.
NIM : 014 946 263
Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 24 Maret 1970
Registrasi Pertama : 2007.2
Riwayat Pendidikan : Masuk SDN. 74 Pontianak Barat tamat tahun 1983, melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP swasta PGRI Mempawah tamat tahun 1986. Kemudian melanjutkan ke SLTA pada Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial di Pontianak Tamat tahun 1990. Pada tahun 1998 melanjutkan ke strata I pada Universitas Kapuas Sintang selesai tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan : Masuk Satuan Tugas Sosial pada tahun 1991 s/d 1992 di Kecamatan Manyuke, Tahun 1992 diangkat sebagai PNS di tempatkan pada Kantor Departemen Sosial Kabupaten Sintang. Pada Tahun 2009 dimutasikan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang hingga sekarang.

Alamat Lengkap : BTN Griya Wisata Permai Blok.F No. 37 Baning – Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Telp/HP : 0565 – 2025003 / 081 345 372 939

Sintang, 10 Desember 2009



MARBUANSYAH.
NIM. 014 946 263

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Pedoman wawancara	I
2. Transkrip data hasil wawancara	II
3. Daftar nama anggota KUBE Desa Sungai Pukat	III
4. Biodata penulis	IV
5. Surat izin penelitian	V
6. Keterangan penelitian	VI

UNIVERSITAS TERBUKA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

Alamat: Jalan Raya Pakti II
Pontianak - 78121
Telp : 0561-736107, 730291, 760791
Fax : 0561-736107
Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)

Yth : Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja & Transmigrasi
Kab. Sintang

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	MARBUANSYAH	014946263	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009
A.n. Kepala UPBJJ-UT Pontianak
Kasubbag Tata Usaha


RAMAYANTI, S.IP
NIP. 131 790 876



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Jalan MT.Haryono Km 2 Telp.0565-23182
 Faxis. (0565)24520 Sintang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 465/265/DS MT-17.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, menerangkan bahwa :

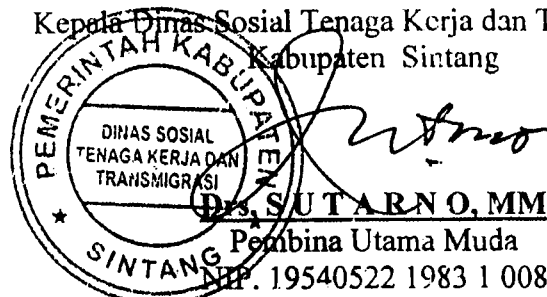
Nama : Marbuansyah, S. Sos
 Nim : 014 946 263
 Mahasiswa : Pasca Sarjana Universitas Terbuka .
 Program Studi : Administrasi Publik
 Alamat Rumah : BTN Griya Wisata Permai Blok F. 37 Baring
 Kabupaten Sintang – Kalimantan Barat
 Telp/HP : 0565-2025003/ 081345372939

Benar telah melakukan Penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Bantuan Sosial Pola KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Desa Sungai Pukat Kecamatan Kelam Permai. Penelitian dilakukan sejak bulan Maret s/d Juni 2009, TAPM ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik.

Demikian surat Keterangan ini diberikan sebagai kelengkapan hasil penelitian yang bersangkutan.

Sintang, 4 Juni 2009

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Kabupaten Sintang





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

14/41264.pdf
Alamat : Jalan Karya Bhakti II
Pontianak - 78121
Telp : 0561-736107,730291,760791
Fax : 0561-736107
Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)

Yth : Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja & Transmigrasi
Kab. Sintang

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	MARBUANSYAH	014946263	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009
A.n. Kepala UPBJJ-UT Pontianak
Kasubbag Tata Usaha


RAMAYANTI, S.IP
NIP. 131 790 876



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Universitas Terbuka

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pontianak

Alamat : Jalan Karya Bhakti II
Pontianak - 78121
Telp : 0561-736107, 730291, 760791
Fax : 0561-736107
Email : ut-pontianak@upbjj.ut.ac.id

Nomor : 0296 /H31.43/AK/2009
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM)

Yth : Camat Kelam Permai
Kab. Sintang

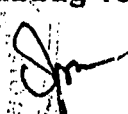
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

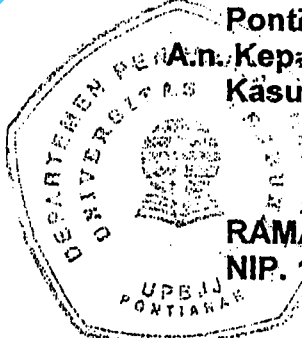
No	Nama	Nim	Kode Mata Kuliah
1	MARBUANSYAH	014946263	MAPU 5400 (Tugas Akhir Program Magister)

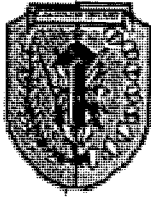
Bermaksud akan melaksanakan penelitian TAPM (Tugas Akhir Program Magister) / Tesis, di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas kerja sama dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 04 April 2009
A.n. Kepala UPBJJ-UT Pontianak
Kasubbag Tata Usaha


RAMAYANTI, S.IP
NIP. 131 790 876





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KELAM PERMAI
 Jalan : Sintang - Putussibau
KEBONG - 78651

SURAT KETERANGAN

420.4/ 412 /KES DAN PM/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Pj. Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama	: MARBUANSYAH
NIM	: 014946263
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	: Administrasi Publik

Mahasiswa Tersebut telah melakukan Penelitian untuk persyaratan Penyusunan TESIS pada Universitas Terbuka Terhitung 22 April sampai dengan 11 Juni 2009 di Desa Sungai Pukat. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebong, 18 Juni 2009

Pj. Camat Kelam Permai

